

No. Reg: 221200000056993

LAPORAN PENELITIAN



PENGEMBANGAN KURIKULUM KJNI BERBASIS KARAKTER DAN BERWAWASAN KEBANGSAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (Suatu Analisis dengan Pendekatan Fenomenologis dan Humanisme)

Ketua Peneliti:

Muhammad Faisal, M. Ag

NIDN: 2024087101

ID Peneliti: 202408710108000

Anggota:

1. Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I. (NIDN. 0414088605)
2. Muhammad Syarif, S.Pd.I., MA. (NIDN. 1329078501)
3. Qurrata A'yuna, M.Pd. Kons. (NIDN. 0102128501)

Kategori Penelitian	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022

No. Reg: 22120000056993

LAPORAN PENELITIAN



**PENGEMBANGAN KURIKULUM KKNi BERBASIS KARAKTER DAN
BERWAWASAN KEBANGSAAN PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI**
(Suatu Analisis dengan Pendekatan Fenomenologis dan Humanisme)

Ketua Peneliti

Muhammad Faisal, M. Ag

NIDN: 2024087101

ID Peneliti: 202408710108000

Anggota Peneliti:

1. Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I. (NIDN. 0414088605)
2. Muhammad Syarif, S.Pd.I., MA. (NIDN. 1329078501)
3. Qurrata A'yuna, M.Pd. Kons. (NIDN. 0102128501)

Kategori Penelitian	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. a. Judul Penelitian : **Pengembangan Kurikulum KKNI Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri**
- b. No. Registrasi : 221200000056993
- c. Kategori Penelitian : Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Muhammad Faisal, M. Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 197108241998031002
 - d. NIDN : 2024087101
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202408710108000
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/a)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : FTK/ MPI

 - i. Pembantu Peneliti :
 - 1) Nama Lengkap : Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.
Fakultas/Instansi : FAI Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
 - 2) Nama Lengkap : Muhammad Syarif, S.Pd.I., MA
Fakultas/Instansi : FAI Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
 - 3) Nama Lengkap : Qurrata A'yuna, M.Pd. Kons.
Fakultas/Instansi : FTK Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh

3. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : 2022
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 80.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022
8. Luaran (*outcome*) Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2022
Peneliti,

Muhammad Faisal, M. Ag.
NIDN. 2024087101

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H.Mujiburrahman, M.Ag.
NIP. 197109082001121001

PERNYATAAN

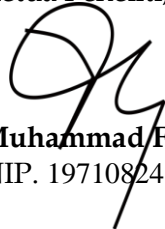
Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Muhammad Faisal, M. Ag**
NIP : 197108241998031002
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 24 Agustus 1971
Alamat : Darussalam, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Pengembangan Kurikulum KKNi Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”** adalah benar-benar Karya Asli kami yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/ konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 September 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,


Muhammad Faisal, M. Ag
NIP. 197108241998031002

Pengembangan Kurikulum KKNi Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Ketua Peneliti:

Muhammad Faisal, M. Ag

Anggota Peneliti:

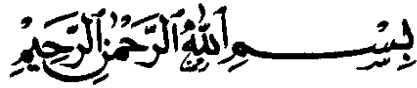
1. Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.
2. Muhammad Syarif, S. Pd.I., MA.
3. Qurrata A'yuna, M.Pd. Kons.

Abstrak

Pengembangan karakter berwawasan kebangsaan sangat penting dilakukan oleh perguruan tinggi dan stakeholders-nya untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Implementasi pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan di perguruan tinggi harus disesuaikan dengan visi dan misi perguruan tinggi tersebut dengan berbasis jurusan dan atau program studi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan model paradigma Naturalistik, sosial fenomenologis dan humanisme. Subjek dalam penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, sedangkan data dianalisis secara berulang-ulang (cyclical) dengan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian didapatkan bahwa; pertama, perlunya PT melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu. Kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu bidang manajemen yang mencakup dimensi proses dan substansi. Kedua, UIN Sunan Kalijaga memberikan tiga matra penting dalam setiap tindakan edukatif dan campur tangan intensional bagi sebuah kemajuan pendidikan. Ketiga matra pendidikan karakter itu adalah individu, sosial, dan moral. Ketiga, pengembangan Kurikulum KKNi berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diupayakan dengan mengasah potensi mahasiswa untuk menjadi agen yang berwawasan luas dan memiliki skill yang memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masyarakat. Keempat, optimalisasi terhadap pembentukan karakter dan berwawasan kebangsaan pada UIN Sunan Kalijaga diselaraskan dengan kurikulum yang diterapkan pada perguruan tinggi yaitu kurikulum yang mengacu kepada KKNi.

Kata Kunci: *Kurikulum KKNi, Pendidikan Karakter, Wawasan Kebangsaan, PTKIN*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pengembangan Kurikulum KKNi Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Bapak Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Rektor beserta segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dekan Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Prof. Dr. Badruddin, MA., dari Universiti Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah bersedia menjadi Ekspert untuk membahas isi sekaligus menguatkan hasil penelitian ini;
7. Tim Pinus Institute yang telah memfasilitasi dalam melakukan pengujian draft dan hasil awal penelitian ini;

8. Para Staf dan Karyawan LP2M dan Puslitpen UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Dosen-dosen dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah ikut membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat, di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 1 Oktober 2022

Ketua Peneliti,



Muhammad Faisal, M. Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Kurikulum	24
B. Pengembangan Kurikulum	41
C. Pengembangan Pendidikan Karakter	54
D. Tujuan Pendidikan Karakter.....	62
E. Dasar Pembentukan Karakter	67
F. Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Karakter di Perguruan Tinggi.....	78
G. Wawasan Kebangsaan.....	81
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	85
B. Teknik Pengumpulan Data.....	87
C. Teknik Analisis Data	90
D. Anggaran Biaya.....	92
E. Jadwal Pelaksanaan.....	93
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Realitas dan Mutu Pendidikan di PTKIN.....	97
B. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan pada PTKIN	105
C. Membangun PTKIN Berorientasi Mutu	111

D. Kerangka Model Pendidikan Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada PTKIN	125
E. Pengembangan dan Penerapan Kurikulum KKNI Berbasis Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada PTKIN Indonesia.....	136
F. Sinergisitas Pendidikan Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan dalam Kurikulum KKNI pada PTKIN.....	140
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran-saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk ikut andil dalam pembentukan karakter bangsa. Sebagai tenaga pendidik pada perguruan tinggi, dosen secara profesional memiliki fungsi sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih sehingga dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara bersamaan. Hal tersebut menjadi pintu masuk bagi pendidikan karakter untuk dapat diimplementasikan di tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pengembangan karakter berwawasan kebangsaan sangat penting dilakukan oleh perguruan tinggi dan *stakeholders*-nya untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus dirancang secara terintegrasi agar dapat menghasilkan lulusan yang profesional, berkarakter unggul dan terpuji yang dapat dijadikan suri tauladan di masyarakat.

Implementasi pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan di perguruan tinggi harus disesuaikan dengan visi dan misi perguruan tinggi tersebut dengan berbasis jurusan dan atau program studi. Penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu pembelajaran, manajemen perguruan tinggi, dan kegiatan kemahasiswaan. Nilai-nilai karakter

yang diterapkan adalah dengan memilih nilai-nilai inti (*core values*) yang akan dikembangkan dan diimplementasikan pada masing-masing jurusan dan atau program studi.

Pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia saat ini memang dirasa mendesak, terutama jika dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh. Selain itu, pendidikan yang dilaksanakan pada Perguruan Tinggi sekarang juga merekomendasikan perlunya penyempurnaan konsep dasar kurikulum dan selanjutnya dilaksanakan dengan taat asas. Kurikulum Perguruan Tinggi harus mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi berbagai persaingan di dunia global dan perubahan masyarakat pada masa yang akan datang.

Di samping itu, globalisasi telah mengakibatkan perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, pengembangan kurikulum merupakan salah satu strategi untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan dapat memiliki beberapa keahlian, terutama kemampuan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan-kecakapan berpikir teoretis dan praktis serta kecakapan-kecakapan lainnya untuk dapat melakukan tugas pekerjaan secara efektif sesuai dengan tuntutan standar pekerjaan tertentu (Muhaimin, 2009: 154-155). Maka, peninjauan kembali terhadap kurikulum dan proses belajar mengajar hendaknya difokuskan pada pembinaan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, yaitu 1) sikap dan tata

nilai; 2) kemampuan kerja; 3) penguasaan pengetahuan; dan 4) tanggung jawab dan wewenang. Keempat kompetensi tersebut dijabarkan dalam capaian pembelajaran kurikulum berbasis yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan harapan kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, bidang karakter dan keilmuan serta pengalaman kerja.

Perguruan Tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, mempunyai tujuan membentuk sarjana-sarjana yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap, serta mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa, sesuai dengan keahliannya, serta untuk memenuhi keperluan umum. Tujuan ini kemudian dituangkan dan dikembangkan dalam tugas pokok perguruan tinggi, yaitu bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menjadi mediator antara ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalan yang muncul seputar penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana kritik banyak pihak berkisar pada kualitas, potensi, sistem, etos kerja, pendanaan, sarana pendukung, atau persoalan yang berkaitan dengan fungsi dan perannya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) atau lulusan. Kritik tersebut merupakan indikator untuk menentukan standar kualitas perguruan tinggi. Dari beberapa persoalan-persoalan utama yang dihadapi perguruan tinggi tersebut, ada persoalan yang memerlukan pemecahan yang bersifat segera, antara lain; mutu lulusan yang berkarakter dan sumbangan perguruan tinggi terhadap pengembangan keilmuan. Secara kuantitas, lulusan perguruan tinggi

sudah cukup besar. Secara kualitas kondisinya masih jauh dari memuaskan. Mutu lulusan masih dianggap belum memenuhi harapan masyarakat. Keluhan seperti ini meliputi berbagai hal, mulai dari kompetensi yang paling dasar sampai profesionalitas mereka dalam melakukan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya masih banyak lulusan yang belum/ tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan pada akhirnya banyak di antara mereka yang masih menganggur.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan di atas, salah satu faktor yang sering dijadikan sasaran penyebab dan kurang berhasilnya perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pokok yang termaktub dalam PP. No. 60 tahun 1999 adalah faktor kurikulum. Mengingat, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, keberadaan kurikulum tidak saja terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di dalam kampus (Hamalik, 2007: 4). Oleh karena itu, posisi kurikulum sebagai mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas perguruan tinggi (Furchan, 2007: 1).

Dalam telaah Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 2 juga menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi

dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, pengembangan karakter, akhlak mulia dan keterampilan.

Di samping itu, globalisasi telah mengakibatkan perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, pengembangan kurikulum merupakan salah satu strategi untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan dapat memiliki beberapa keahlian, terutama kemampuan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan-kecakapan berpikir teoretis dan praktis serta kecakapan-kecakapan lainnya untuk dapat melakukan tugas pekerjaan secara efektif sesuai dengan tuntutan standar pekerjaan tertentu (Muhaimin, 2009: 154-155). Maka, peninjauan kembali terhadap kurikulum dan proses belajar mengajar hendaknya difokuskan pada pembinaan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, yaitu 1) sikap dan tata nilai; 2) kemampuan kerja; 3) penguasaan pengetahuan; dan 4) tanggung jawab dan wewenang. Keempat kompetensi tersebut dijabarkan dalam capaian pembelajaran kurikulum berbasis yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan harapan kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, bidang karakter dan keilmuan serta pengalaman kerja.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali

Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi (PT) mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh PT telah menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran.

Saat ini pendidikan tinggi mengalami perubahan orientasi kompetensi lulusan (SKL). Sebelum tahun 2013 perguruan tinggi bertujuan membekali ilmu pengetahuan kepada peserta didik di mana orientasinya adalah menyiapkan lulusan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang handal, baik itu untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus ataupun tidak. Namun sekarang ini lulusan perguruan tinggi harus memiliki tiga kemampuan yang berbeda, yaitu terjun ke dunia kerja, tetapi bila tidak bekerja mereka harus siap melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha. Dengan adanya tiga kompetensi dari lulusan ini maka perlu upaya perubahan konsep dari dasar filosofi, pengembangan kurikulum, dan pembelajarannya agar mampu memenuhi ketiga tuntutan tersebut.

Sejak tahun 2013, Perguruan Tinggi di Indonesia sudah mulai bergerak, menerapkan dan membangun kurikulum pendidikannya yang mengacu kepada KKNi atau disebut juga dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI). Sehingga, sistem pendidikan di Indonesia yang selama ini masih menitikberatkan pada kecerdasan kognitif dapat dielaborasi sekaligus menjadi *kognitif*, *afektif* dan *psikomotorik*.

Proses pendidikan dengan Kurikulum KKNI berfokus untuk mencapai hasil tertentu dari segi pembelajaran secara individu dengan berbagai metode yang berpusat pada peserta didik (SCL). Hasil menjadi hal utama, peserta didik harus memahami dan bisa melakukan atau sifat-sifat yang mereka harus kembangkan. Struktur Pendidikan dan kurikulum dirancang untuk mencapai kemampuan yang mempunyai keterampilan dan kualitas. Jika hasil tidak dicapai, perbaikan program dibuat berdasarkan program yang dijalankan pada waktu tersebut untuk memastikan ada Peningkatan Mutu Berkelanjutan (CQI) dalam sistem pendidikan dan penekanan secara berkelanjutan pun harus diberikan.

Saat ini pendidikan harus lebih difokuskan pada *outcome based* bukan hanya *output based*. Pendidikan yang lebih pada *Output Based Education* harus diwarnai lain menjadi *Outcome Based Education*, sehingga capaian pendidikan tidak hanya pada dataran *kognitif* saja, akan tetapi juga pada dataran *afektif* dan *psikomotorik* peserta didik. Dengan demikian, maka perguruan tinggi nantinya akan melahirkan lulusan yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, bermutu, peduli, dan tangguh.

Secara umum, penelitian ini ingin melihat dan menemukan bentuk dan model penerapan kurikulum KKNI pada Perguruan Keagamaan Islam Negeri di Aceh serta menemukan relevansinya dalam pengembangan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, sehingga bisa menjadi rumusan model dan paradigma pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mempunyai karakter yang bermutu.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah realitas dan mutu pendidikan di PTKIN sekarang ini?
2. Bagaimanakah kerangka model pendidikan berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan pada PTKIN?
3. Bagaimanakah pengembangan Kurikulum KKNI berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan pada PTKIN?
4. Bagaimanakah sinergisitas pendidikan berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan dalam kurikulum KKNI pada PTKIN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realitas dan mutu pendidikan di PTKIN sekarang ini!
2. Untuk mengetahui kerangka model pendidikan berbasis karakter dan berwawasan kebangsaan pada PTKIN!
3. Untuk mengetahui pengembangan Kurikulum KKNI berbasis karakter dan berwawasan kebangsaan pada PTKIN!
4. Untuk mengetahui sinergisitas pendidikan berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan dalam kurikulum KKNI pada PTKIN yang mengacu kepada KKNI!

D. Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Merumuskan fondasi teoretis dan empiris untuk pengembangan paradigma pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

2. Mendapatkan *template* model pengembangan kurikulum, pembelajaran, asesmen pencapaian kompetensi, dan uji kompetensi untuk pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Mendapatkan model empirik uji kompetensi dan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia;
4. Melakukan validasi model pengembangan kurikulum yang mengacu kepada KKNi berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia.

Selain itu, peneliti ini mempunyai kontribusi nyata tercapainya restra dan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang sudah dirancang oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan isu strategis peningkatan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan antara lain yaitu, penerapan entrepreneurship dalam pembelajaran, peningkatan kecerdasan jamak (*multiple intelligent*), pengembangan kurikulum, pengembangan asesmen dan evaluasi pembelajaran dan pengembangan model-model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Sesuai dengan restra dan RIP Universitas tersebut, maka penelitian ini mempunyai kontribusi untuk perguruan tinggi payung, yaitu meningkatkan mutu lulusan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, melahirkan lulusan yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, bermutu, peduli, dan tangguh dan berdaya saing tinggi dalam mengembangkan pendidikan dan keahliannya pada bidang yang ditekuni dan dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul baik di lingkungan kampus maupun

dilingkungkan masyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya, struktur Pendidikan dan kurikulum Perguruan Tinggi juga dapat dirancang dengan keterampilan dan kualitas, sehingga nantinya perguruan tinggi akan melahirkan lulusan yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, bermutu, peduli, tangguh dan berwawasan kebangsaan. Dengan harapan kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, bidang karakter dan keilmuan serta pengalaman kerja.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini penting dilakukan, karena penelitian tentang pengembangan kurikulum KKNi berbasis karakter dan berwawasan kebangsaan belum banyak yang melakukannya. Ada beberapa penelitian yang bersinggungan dengan kajian ini.

Pertama, studi tentang rekonstruksi pengembangan kurikulum pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK se-kota Bengkulu (2013). Penelitian ini menghasilkan gambaran tentang mekanisme perubahan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan selama ini tidak standar berdasarkan analisis kebutuhan (need analisis). Disamping itu, pihak sebagai pelaku dan pengelola pengembangan kurikulum belum memiliki standar pengembangan kurikulum secara tertulis (permanen) dalam melakukan upaya pengembangan kurikulum dalam rangka menjembatani keinginan, kebutuhan serta harapan semua pihak.

Kedua, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi Agroindustri Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,

kajian ilmiah yang dilakukan oleh Mukhidin dan Mustika Nuramalia Handayani pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia (2014). Hasil penelitian ini berupa strategi pengembangan kurikulum pendidikan teknologi agroindustri berbasis KKNI dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: (1) perumusan profil lulusan melalui analisis SWOT juga tracer study; (2) perumusan learning outcome (capaian pembelajaran) program studi mengacu pada KKNI; (3) perumusan bidang kajian dan kedalaman mata kuliah; (4) penyusunan struktur kurikulum dan silabus kedalam dokumen kurikulum program studi pendidikan teknologi agroindustri.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukiman, diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, yang diterbitkan oleh Remaja Rosdakarya Bandung tahun 2015, memberikan gambaran tentang implementasi pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi. Lebih jauh Sukiman ingin menyajikan kasus pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi dengan menaruh perhatian pada keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan penanaman keimanan dan ketakwaan (imptak) yang mantap. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena masyarakat sudah mulai sadar bahwa dengan penguasaan iptek akan dapat mengatasi berbagai masalah kehidupan secara efisien dan efektif, sementara dengan bekal agama, moral, dan akhlak yang mulia ia tidak akan tersesat dalam kehidupan pada hal-hal yang destruktif. Dalam kajian ini masih menekankan pada pengembangan kurikulum berbasis KBK sementara tuntutan dewasa ini adalah tuntutan kurikulum berbasis

dunia kerja yang terstandar, sehingga masih perlu dikembangkan dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang juga diintrodusir dalam standar nasional pendidikan tinggi.

F. Konsep atau Teori yang Relevan

Tujuan utama pendidikan Indonesia sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945 ada dua: untuk mengembangkan karakter, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Berbagai dokumen kebijakan, termasuk UUD 1945 dan UU Sisdiknas tahun 2003 yang terbaru, serupa dalam menyatakan tujuan pendidikan tersebut. Inilah yang menjadi dasar kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. Semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini – “cerdas dan berkarakter” menggarisbawahi pentingnya kedua tujuan tersebut. Filosofi tersebut dibangun di atas filosofi Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang menekankan empat konsep terpadu (tujuan etis, intelektual, estetika, dan kinestetik) dan tiga pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat). Filosofi yang mendasari pendidikan karakter adalah “holistik”, dan menggabungkan peningkatan karakter dan kecerdasan, dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan ini.

Terlepas dari landasan bersama ini, cara penerapan konsep-konsep kunci ini berbeda dalam konteks politik yang berbeda (Paglayan, 2017). Selama era Orde Baru (1966-1998), tidak ada kebijakan khusus tentang pendidikan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter sangat menekankan pada pembangunan bangsa dan nilai-nilai agama

dan moral (lihat misalnya Kelabora, 1979). Sekolah-sekolah pada waktu itu membahas pendidikan karakter dengan mengajarkan Pancasila, yang merupakan falsafah resmi pemerintahan Orde Baru Indonesia.¹ Pendidikan Moral, mata pelajaran yang menekankan bahwa moralitas, religiusitas, dan nasionalisme adalah bagian dari falsafah nasional. Setelah reformasi politik Indonesia pada tahun 1998, penekanannya telah bergeser. Mengikuti kecenderungan demokratisasi saat itu, Pendidikan Moral Pancasila berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada masa transisi ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang-Undang Sisdiknas, memasukkan nilai-nilai kunci yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter.

Pada tahun 2010, pembuat kebijakan di Kemdikbud mengadopsi konsep Ki Hadjar Dewantara sebagai dasar kebijakan Pendidikan Karakter (PK). Konsep kunci kebijakan 2010 menempatkan aspek moral, religiusitas, dan nasionalisme di garis depan pendidikan, tanpa mengurangi aspek pembelajaran. Rencana Aksi Pendidikan Karakter 2010 menetapkan 18 nilai karakter yang perlu dicapai siswa di sekolah-sekolah di Indonesia. Hambali (2015) mengelompokkan mereka ke dalam empat set karakter: religiusitas, nasionalisme, produktivitas, dan kreativitas. Dua karakter terakhir, menurut pandangan kami, berkaitan dengan perkembangan intelektualitas siswa, yang terkait dengan hasil belajar.

Kebijakan pendidikan karakter yang terakhir, PPK, merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya, dan masih berdasarkan prinsip-prinsip Ki Hadjar Dewantara. Ke-18 nilai

¹ Untuk gambaran singkat tentang lima sila Pancasila lihat [https://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_\(politics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_(politics)).

karakter tersebut diadopsi dan dikelompokkan ke dalam lima aspek: religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong-royong. Meskipun peneliti memang melihat bahwa kurang dari setengah dari nilai-nilai tersebut berhubungan dengan pembelajaran keterampilan atau kemampuan (seperti membaca, matematika, sains, sejarah), peneliti berpandangan bahwa PPK yang dirancang tidak dengan sendirinya mengurangi aspek pembelajaran.

G. Dasar Pemikiran dan Kerangka Teoritik

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu *input*, *process*, *output* dan *outcomes* (DIKTI, 2014). Pertama adalah tahap *input* yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain ; nilai kelulusan yang baik di berbagai aspek penilaian, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai.

Kedua adalah tahap proses pembelajaran (*process of learning*) yang baik memiliki beberapa unsur yang harus diterapkan, antara lain: (1) Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas, (2) Organisasi PT yang sehat, (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel, (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (5) Kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia akademik dan non akademik yang handal, serta profesional, (6) Ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai (DIKTI, 2014). Tahap ini merupakan perjuangan PT dalam menciptakan tenaga yang sesuai dengan profil lulusan PT.

Tahap terakhir yaitu *output* dari pembelajaran pendidikan tinggi. Tahap ini mempunyai beberapa indikator yang sering digunakan

untuk menilai keberhasilan lulusan PT, yaitu: (1) IPK, (2) Lama Studi dan (3) Predikat kelulusan yang disandang. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (input) (DIKTI, 2014).

Kurikulum pendidikan tinggi mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Proses penyusunan kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3); 2) Rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah; 3) Permasalahan internal PT; 4) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 5) Tuntutan dunia kerja (DIKTI, 2014).

Parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar Negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. *Roadmap* atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja profesional antar Negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan *roadmap* tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA, hingga tahun ini adalah: (1) *engineers*, (2) *architect*, (3) *accountant*, (4) *land surveyors*, (5) *medical doctor*, (6) *dentist*, (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism* (DIKTI, 2014).

Dalam proses pengembangan pendidikan di Indonesia, dikembangkan asas yang menjadi pilar dari pendidikan di Indonesia, yaitu:

a) *Learning to know*

Pembelajaran bertujuan untuk belajar dan menemukan, memahami lingkungan seseorang. Pendidikan mengacu pada proses berfikir secara rasional dan kritis. Pembelajaran digunakan untuk mencari pengetahuan dengan metode ilmiah, kemudian mengembangkan kebebasan dalam mengambil suatu keputusan.

b) *Learning to do*

Pembelajaran digunakan untuk mengembangkan praktik terhadap pencapaian kompetensi, kemudian mempraktikkan materi yang telah dipelajari. Pembelajaran juga harus mentransformasi pengetahuan, inovasi-inovasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hasil pembelajaran yang diciptakan pada lapangan pekerjaan harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja dengan orang lain (kolaborasi), serta mengelola dan mencari pemecahan konflik dalam setiap masalah yang dihadapi dalam bekerja.

c) *Learning to be*

Pembelajaran digunakan untuk mengembangkan pola pikir dan fisik, intelegensi, sensitivitas, tanggungjawab dan nilai-nilai spiritual. Pembelajaran juga digunakan untuk mengembangkan mutu imajinasi dan kreativitas, serta pengasahan kemampuan. Hasil pembelajaran digunakan sebagai pengembang potensi diri untuk membuka kemampuan yang tersembunyi pada diri manusia, dan dalam waktu bersamaan terjadi konstruksi interaksi sosial.

d) *Learning to life together*

Pembelajaran digunakan untuk menghormati keragaman, memahami dan mengerti diri seseorang, serta terbuka atau *receptive* terhadap yang lainnya. Pembelajaran juga berguna untuk mengembangkan kemampuan dalam memecahkan perbedaan pendapat melalui dialog dengan selalu perhatian dan berbagi satu sama lain. Pembelajaran dapat digunakan sebagai landasan untuk bekerja dengan tujuan yang jelas, serta mengelola dan memecahkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

e) Belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*)

Konsep belajar sepanjang hayat merupakan hal penting untuk memasuki persaingan pada abad moderen, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dari cepatnya perubahan-perubahan di dunia. Belajar sepanjang hayat ini akan memperkuat pilar *learning to life together* melalui pengembangan pemahaman terhadap orang lain dan sejarahnya, tradisi dan nilai-nilai spiritual. Sehingga akan menciptakan semangat baru dengan saling menghormati, mengakui saling ketergantungan, serta melakukan analisis bersama terhadap risiko dan tantangan di masa depan.

Selain itu dalam pengembangan pendidikan di Indonesia diterapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait sistem pendidikan nasional yang memungkinkan hasil dari sebuah pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan perangkat yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa

lain di dunia (DIKTI, 2014). Fungsi adanya KKNI terletak pada penyetaraan diseluruh bidang dan sektor sistem pendidikan tinggi yang terdapat dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. CP pada setiap level KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi.

H. Lingkup dan Dasar Kajian

Pendidikan Tinggi sebagai suatu sistem, programnya harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengarungi kehidupan nyata di masa depan. Artinya pendidikan tinggi harus membekali peserta didik agar bisa mencari penghidupan (bekerja) dan mampu hidup sebagai anggota masyarakat, warga negara, sebagai individu, dan sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan tinggi yang mampu membekali peserta didik untuk bisa hidup dan mencari penghidupan dalam masyarakat yang nyata ini disebut pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup.

Perubahan orientasi pendidikan merupakan keniscayaan karena masyarakat terus berubah. Sayling Wen (2003) menyatakan

bahwa perubahan dalam kualitas pendidikan masa depan antara lain: (1) perubahan dari pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan menjadi pengembangan ke segala arah yang seimbang, (2) dari pembelajaran bersama yang disentralisasikan menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan yang didesentralisasikan, (3) dari pembelajaran yang terbatas pada tahapan pendidikan menjadi pembelajaran seumur hidup dan (4) dari pengakuan biasa menjadi pengakuan kekuatan-kekuatan nyata. Dengan demikian, akan terjadi perubahan kualitas tenaga kerja yang mampu bekerja di dunia kerja yang selalu berubah.

Dinamika perubahan yang sangat dinamis itu harus selalu dicermati, dipantau, dan dijadikan rujukan dalam mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi, terutama dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Hal itu juga merupakan upaya untuk menjaga sustainabilitas perguruan tinggi di tengah arus perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berdampak langsung kepada tuntutan pengetahuan, sikap, karakter dan keterampilan lulusannya. Sejak Tahun 1993 Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan kebijakan *link and match*, dimana kebijakan ini dioperasionalkan dalam bentuk Pendidikan Sistem Ganda (PSG), (Wardiman, 1998).

Perguruan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia kerja yang ada. Pengembangan tenaga kerja yang *marketable* dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan pasar (*demand driven*) melalui peningkatan kompetensi lulusan. Selain itu perguruan tinggi lebih dekat dengan kebutuhan sektor lapangan

kerja dan mengarah kepada pemberian solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan dalam memasuki era perdagangan bebas yang menuntut kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu kompetensi menjadi hal yang sangat penting agar para lulusan dapat diserap di dunia kerja. Berdasarkan Kepmendiknas No.045/U/2002 kurikulum pada perguruan tinggi adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Karena itu kompetensi adalah sentral yang harus dibangun dalam pendidikan tinggi termasuk bagaimana penetapan dan bagaimana pengukuran kompetensinya.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector (Tim, 2014: 11). Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Selain itu, KKNI juga merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki oleh bangsa ini. Selain itu, melalui penerapan KKNI hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Melalui fungsi yang komprehensif tersebut, menjadikan KKNI berpengaruh pada setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada system pendidikan tinggi, terutama pada aspek kurikulum (Tim, 2014:11).

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai capaian pembelajaran (CP) yang mencakup aspek-aspek

pembangunan jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Dalam KKNI, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam empat unsur yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. *Sikap dan tata nilai*, merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. *Kemampuan kerja*, merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif bermanfaat. *Penguasaan pengetahuan*, merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terkumulasi untuk memiliki suatu kemampuan. *Wewenang dan tanggung jawab*, merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

I. Rencana Pembahasan

Penelitian ini direncanakan pembahasannya dengan mengacu kepada konsep kajian yang tidak terlepas dari masalah kajian yang diangkat. Pembahasan dalam kajian ini dimulai dengan Pendidikan Tinggi sebagai suatu sistem, programnya harus mampu memenuhi

kebutuhan peserta didik dalam mengarungi kehidupan nyata di masa depan. Selanjutnya dikaitkan dengan perubahan orientasi pendidikan merupakan yang merupakan keniscayaan karena masyarakat terus berubah. Perubahan tersebut adalah perubahan dalam kualitas pendidikan masa depan antara lain: (1) perubahan dari pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan menjadi pengembangan ke segala arah yang seimbang, (2) dari pembelajaran bersama yang disentralisasikan menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan yang didesentralisasikan, (3) dari pembelajaran yang terbatas pada tahapan pendidikan menjadi pembelajaran seumur hidup dan (4) dari pengakuan biasa menjadi pengakuan kekuatan-kekuatan nyata. Dengan demikian, akan terjadi perubahan kualitas tenaga kerja yang mampu bekerja di dunia kerja yang selalu berubah.

Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini juga menitik beratkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Aspek penting dalam KKNI adalah deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai capaian pembelajaran (CP) yang mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Rumusan CP disusun dalam empat unsur yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. *Sikap dan tata nilai*, merupakan perilaku dan tata

nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. *Kemampuan kerja*, merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif bermanfaat. *Penguasaan pengetahuan*, merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan. *Wewenang dan tanggung jawab*, merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Secara umum rencana pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi, BAB I: Pendahuluan, BAB II: Landasan Teori, BAB III: Metode Penelitian, BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB V: Penutup dan Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.

Kata “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari *start* hingga *finish*. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan sebagai *Manhaj*, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.¹

Dalam bukunya, Ramayulis mengutip dari Langgulong yang menyatakan bahwa kurikulum berasal dari kata *curir* yang berarti

¹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1

pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu.² Istilah *curere* belum terdapat dalam kamus Webster tahun 1812 dan baru timbul untuk pertama kalinya dalam kamus tahun 1856. Kurikulum juga berarti *Chariot*, semacam kereta pacu pada zaman dahulu, yakni suatu alat yang membawa seseorang dari start sampai finish.³ Jika dalam pendidikan Islam, maka konteksnya berubah yakni suatu hal yang harus dilalui oleh peserta didik dan pendidik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran.

Artinya, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi peserta didik. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, seperti: bangunan, alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, karyawan tata usaha, dan lain-lain.⁴

Dalam Kamus Webster's, misalnya, istilah kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh para siswa untuk dapat naik kelas atau mendapat ijazah. Pengertian senada disampaikan oleh Robert Zais yang mengatakan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Kedua definisi ini menekankan pada daftar mata pelajaran.⁵

² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 150.

³ Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1-2. Lihat juga Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 240.

⁴ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 10

⁵ Khaerudin, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Lokal Berwawasan Global*, (<http://www.ilmupendidikan.net>, diakses 15 Mei 2012)

Istilah kurikulum ini dipopulerkan oleh John Franklin Bobbit dalam bukunya *The Curriculum* yang diterbitkan pada tahun 1918. Menurut Bobbit, kurikulum merupakan suatu naskah panduan mengenai pengalaman yang harus didapatkan anak-anak agar menjadi orang dewasa yang seharusnya. Oleh karena itu kurikulum merupakan kondisi ideal dibandingkan kondisi real. Kurikulum diibaratkan sebagai “jalur pacu” atau “kendaraan” untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.⁶ Adapun BPNSP mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁷

Glatthorn mengartikan kurikulum sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di lembaga pendidikan, disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang tidak berkepentingan, dan dapat membawa perubahan tingkah laku.⁸

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dijadikan pedoman dalam segala hal kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas.

⁶ *Ibid.*

⁷ BSNP, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006)

⁸ Ahmad, dkk., *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 15

Kurikulum merupakan isi dan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sesungguhnya kurikulum menyangkut masalah nilai, ilmu, teori, *skill*, praktek, pembinaan sikap mental dan sebagainya. Ini berarti kurikulum harus mengandung isi pengalaman yang kaya demi realisasi tujuan. Dengan perkataan lain kurikulum harus kaya dengan pengalaman-pengalaman yang bersifat membina kepribadian.⁹

Pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para ahlinya sangat bervariasi, tetapi dari beberapa definisi itu dapat ditarik benang merah, bahwa di satu pihak ada yang menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah, dan di lain pihak lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar.¹⁰

Sedangkan pengertian lain adalah kegiatan yang menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan-penyempurnaan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan ciri khas proses pembelajaran yang terjadi setelah usaha tertentu yang dibuat untuk mengubah suatu keadaan semula menjadi keadaan yang diharapkan.¹¹

Kurikulum sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kurikulum formal dan kurikulum tersembunyi.

a. Kurikulum formal

Pada saat belajar di lembaga pendidikan peserta didik menerima kurikulum formal dan informal. Kurikulum formal sangat sering dipikirkan dibanding kurikulum informal. Tetapi kurikulum

⁹ Abdul Manab, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 17

¹⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 2

¹¹ A. Tresna Sastrawijaya, *Pengembangan Program Pengajaran* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 14.

informal juga penting untuk diketahui. Salah satu contoh kurikulum formal adalah apa yang kita temukan dalam buku teks. Sedangkan contoh kurikulum informal adalah apa yang diajarkan pada siswa tentang sopan santun. Misalnya pada siswa perempuan sering diberitahu untuk bersikap sebagai 'lady', atau pada siswa laki laki diajari untuk jangan cengeng dan menangis.

b. Kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*)

Philip Jackson dalam bukunya *Life in Classroom* (1968) mengembangkan konsep kurikulum tersembunyi, yang dia definisikan sebagai kultur dan nilai yang lebih menonjol yang dianut oleh civitas akademik di suatu lembaga pendidikan. Mc Laren (1998) menyebutnya sebagai hasil yang 'tidak diinginkan' dari proses pendidikan yang di luar materi pembelajaran.

Kurikulum tersembunyi mencerminkan ideologi yang dominan di dalam suatu lembaga pendidikan. Seorang pakar teori, Elliot Eisner (1985) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan mengajarkan lebih dari yang ditawarkan.¹²

2. Pendekatan Kurikulum

Pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin, dibagi menjadi 4, yang aplikasinya adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Subyek Akademik

Perumusan Tujuan: menguasai apa yang sudah ada, yang berupa khasanah ilmu pengetahuan dari berbagai pakar, sebagaimana yang tertuang dari buku; Perumusan Isi: diambil dari

¹² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 15

buku-buku. Perumusan Strategi: iquiri; Proses evaluasi: sesuai dengan bab yang ada di buku.

b. Pendekatan Humanistis

Perumusan Tujuan: menekankan pada problem-problem actual yang berkembang pada saat ini. Baik problem internasional, nasional, local. Guru harus banyak pengalaman dan berimajinasi serta berkreasi membuat cerita atau fiksi untuk ditampilkan kepada seorang anak dan anak disuruh untuk menjawab pertanyaan tersebut; Perumusan Isi: menggali pemikiran anak didik. Peran guru sangat besar dalam mengembangkan kurikulum dengan membaca dari pengalaman; Perumusan Strategi: strategi pembelajaran yang aktif; Proses evaluasi: Penilaiannya adalah penilaian proses bukan hasil, yaitu pada saat melakukan pembelajaran guru melakukan penilaian.

c. Pendekatan Teknologi

Perumusan tujuan: penguasaan kompetensi; Perumusan Isi: yang penting dicari mana topik-topik yang mendukung ia melaksanakan tugas atau tercapainya kompetensi dan tidak harus urut buku; Perumusan strategi: ditentukan dulu tujuannya; Perumusan evaluasi: harus tuntas (*mastery learning*); Misalnya orang mau mengajarkan shalat, diperinci dulu unsur-unsurnya, misalnya gerakan dan ucapan. Sehingga orang dikatakan kompeten shalat sehingga ia menguasai gerakan dan ucapan shalat.

d. Pendekatan rekonstruksi sosial

Perumusan tujuan: sesuai dengan keadaan sosial; Perumusan isi: sesuai dengan desas-desus yang ada di masyarakat dan terjadi pada masyarakat yang belum tertata tatanan sosialnya; Perumusan

strategi: harus berhubungan dengan masyarakat dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan ceramah; Perumusan evaluasi: jenisnya disesuaikan dengan karakteristik materinya.¹³

e. Pendekatan Manajemen Kurikulum

Kegiatan manajemen pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Menurut Soetopo ada dua jenis pendekatan yang dapat ditempuh dalam mengembangkan kurikulum, yaitu pendekatan yang berorientasi pada bahan-bahan pelajaran dan pendekatan yang berorientasi pada tujuan pengajaran.¹⁴

Sedangkan Hamalik mengategorikan pendekatan manajemen pengembangan kurikulum dalam enam pendekatan kegiatan manajemen pengembangan kurikulum yaitu, (a) produktif, (d) humanistik, (c) demokrasi, (d) klasik, (e) romantik, (f) modern.¹⁵

1) Pendekatan Produktif

Pendekatan produktif adalah pendekatan yang di landasi oleh pemikiran dalam bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas diperlukan orang-orang yang mampu memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat. Implikasinya terhadap kurikulum, yaitu kurikulum, disusun sedemikian rupa untuk membentuk manusia yang terampil,

¹³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 140-181. Disadur Nana Syaodih Sukamadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 82

¹⁴Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, *Pembinaan dan...*, 54.

¹⁵Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006), 109.

dan produktif. Untuk itu para lulusannya dituntut agar dapat bekerja sebagai manusia yang terlatih.

2) Pendekatan Humanistik

Pendekatan ini menitikberatkan pada nilai-nilai manusiawi dan nilai-nilai kultural. Kepribadian manusia sesuai dengan nilai-nilai manusiawi dan kultural menempati tempat di atas segalanya.

3) Pendekatan Demokrasi

Pendekatan demokrasi adalah pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran yang bersifat politis, kritik yang dilemparkan oleh pendekatan ini terhadap pendekatan sebelumnya adalah bahwa pendekatan produktif terlalu mengekang anak, oleh karena itu dalam pendekatan ini anak harus diberi kebebasan untuk berkembang dan mampu berpikir dalam kehidupan masyarakat.

4) Pendekatan Klasik

Pendekatan klasik adalah pendekatan yang berpijak pada asumsi bahwa siswa adalah instrumen yang pasif, mampu belajar dan menerima pengarahan, tetapi belum matang melalui kegiatan-kegiatan yang bermakna.

5) Pendekatan Romantik

Pendekatan romantik adalah pendekatan yang berpijak pada asumsi bahwa siswa datang ke sekolah sudah memiliki bekal berupa sikap-sikap nilai-nilai, cita-cita, karena itu mereka harus dimotivasi ke arah yang mendorong mereka berpartisipasi, serta ada keseimbangan antara cita-cita pribadi dan cita-cita masyarakat meski keseimbangan itu belum lengkap.

Implikasi pendekatan ini terhadap kurikulum bahwa kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan, minat dan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Para siswa bebas memilih program yang sesuai dengan minat dan keinginannya.

6) Pendekatan Modern

Pendekatan ini merupakan kombinasi antara pendekatan klasik dan romantik. Menurut pendekatan ini, semua adalah pembuat keputusan dan para pemecah masalah. Proses pandang sebagai sentral untuk menjelaskan tingkah laku, sementara mereka itu beda satu sama lain, sedangkan masalah merupakan kunci di mana proses dimulai, karena itu cara penyelesaian masalah pun berbeda satu sama lainnya, sebab tidak ada dua cara yang sama.

3. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid.¹⁶ Ada tiga pola organisasi kurikulum, yaitu:

a. Separated Subject Curriculum

Kurikulum Separated Subject dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Jadi mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah-pisah itu lebih bersifat *subject-centered*, berpusat pada bahan pelajaran,

¹⁶ Suryosubroto, *Tatalaksana Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 1

daripada *child-centered*, yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Kurikulum bentuk ini disusun berdasarkan pandangan ilmu jiwa asosiasi, yaitu mengharapkan terjadinya kepribadian yang bulat berdasarkan potongan-potongan pengetahuan.¹⁷ Berdasarkan pandangan di atas, kepribadian yang utuh dapat dibentuk dari pengetahuan yang diperoleh secara terpisah. Dari sini jelas bahwa jenis kurikulum ini lebih menekankan pembentukan intelektual daripada pembentukan kepribadian anak didik.

b. Correlated Subject Curriculum

Kurikulum Correlated Subject mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Dalam *correlated subject* tidak berarti harus memaksakan adanya hubungan antara berbagai mata pelajaran tersebut, melainkan tetap mempertahankan adanya batas-batas yang ada. Usaha-usaha memberi korelasi antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain harus memperhatikan tipe-tipe korelasinya, yakni:

- 1) Korelasi okkasional/insidental, maksudnya korelasi dilaksanakan secara tiba-tiba.
- 2) Misalnya: pada pelajaran sejarah dapat dibicarakan tentang geografi dan tumbuh-tumbuhan.
- 3) Korelasi etis, yang bertujuan mendidik budi pekerti sehingga konsentrasi pelajarannya dipilih pendidikan agama.
- 4) Misalnya: pada pendidikan agama itu dibicarakan cara-cara menghormati orang tua, tetangga, kawan dan sebagainya.

¹⁷ Ahmad, dkk., *Pengembangan...*, 32-33

- 5) Korelasi sistematis, yang mana korelasi ini biasanya direncanakan oleh guru.
- 6) Misalnya: bercocok tanam padi dibahas dalam geografi dan ilmu tumbuh-tumbuhan.¹⁸

c. *Integrated Curriculum*

Kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam mata pelajaran. Kurikulum jenis ini sangat mengutamakan agar anak didik dapat memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya. Dengan adanya keterpaduan dan kebulatan bahan pelajaran, diharapkan dapat membentuk kebulatan kepribadian anak yang sesuai dengan lingkungan masyarakat.

Kurikulum jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁹

- 1) Merupakan satu kesatuan bulat dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah masalah-masalah yang diselidiki dan atau dipecahkan murid.
- 2) Didasarkan pada kebutuhan anak, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut masalah kejasmanian maupun kerohanian. Hal ini sengaja ditingkatkan perkembangan sosial anak dengan banyak memberinya kesempatan bekerja sama dalam kelompok.
- 3) Anak dihadapkan pada berbagai situasi yang mengandung permasalahan yang biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang berkaitan

¹⁸ Idi, *Pengembangan Kurikulum...*, 143-144

¹⁹ Ahmad, dkk., *Pengembangan...*, 39-40

dengan pelajaran di sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan anak.

- 4) Mempergunakan dorongan-dorongan sewajarnya pada diri anak dalam melandaskan diri pada teori-teori belajar. Anak diberi kesempatan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan minatnya.
- 5) Pelaksanaannya sering memerlukan waktu yang relatif lebih lama daripada pelajaran biasa di kelas.

4. Manajemen Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum karena mereka dapat melihat kekurangan-kekurangan dalam kurikulum yang dilaksanakan saat itu. Mereka tertarik oleh ide-ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya di sekolah mereka untuk meningkatkan mutu pelajaran.

Karakteristik perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa/peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa/peserta didik.²⁰

Dalam pengembangan kurikulum yang harus diutamakan adalah peserta didik. Hal ini menuntut kemampuan seorang pendidik selaku

²⁰ *Ibid.*, 152

manajer untuk dapat mengolah dan memanfaatkan berbagai sumber yang ada demi terbentuknya kepribadian peserta didik.

Perencanaan kurikulum memiliki multifungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi;
- b. Sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi;
- c. Sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.²¹

Secara umum, dalam perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajar dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan.²² Oleh karena itu pengelolaan komponen perencanaan kurikulum harus memperhatikan faktor tujuan, konten, kegiatan (aktivitas), sumber yang digunakan, dan instrumen evaluasi (pengukuran).

- a. Tujuan

Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial,

²¹ *Ibid*

²² Hamalik, *Dasar-dasar...*, 177

budaya dan alam sekitar. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggara sekolah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

b. Konten

Konten atau isi kurikulum adalah “mata pelajaran pada proses belajar mengajar seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran”.²³ Berikut terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan isi kurikulum, yaitu:

- 1) Signifikansi, yaitu seberapa penting isi kurikulum pada suatu disiplin atau tema studi.
- 2) Validitas, yang berkaitan dengan keotentikan dan keakuratan isi kurikulum.
- 3) Relevansi sosial, yaitu keterkaitan isi kurikulum dengan nilai-nilai moral, cita-cita, permasalahan sosial, untuk membantu siswa menjadi anggota efektif dalam masyarakat.
- 4) *Utility* atau kegunaan (daya guna), berkaitan dengan kegunaan isi kurikulum dalam mempersiapkan siswa menuju kehidupan dewasa.
- 5) *Learnability* atau kemampuan untuk dipelajari, yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami isi kurikulum tersebut.
- 6) Minat, yang berkaitan dengan minat siswa terhadap isi kurikulum tersebut.²⁴

Isi kurikulum dalam implementasinya harus berdasarkan atas tujuan pembelajaran, artinya keseluruhan mata

²³ *Ibid.*, 178

²⁴ *Ibid*

pelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian faktor ini lebih diperhatikan dalam pengelolaan perencanaan kurikulum.

c. Kegiatan (Aktivitas) Belajar

Aktivitas belajar merupakan keseluruhan aktivitas belajar mengajar yang didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditetapkan, sehingga berbagai tujuan kurikulum dapat tercapai. Dalam aktivitas belajar tentunya tidak lepas dari kegiatan pembelajaran oleh guru terhadap siswa.

Pembelajaran adalah suatu proses terjadinya interaksi antara pelajar dan pengajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satuan waktu tertentu pula. Proses pembelajaran berlangsung melalui tahap-tahap persiapan (desain pembelajaran), pelaksanaan yang melibatkan pengajar dan siswa, berlangsung dalam kelas dan luar kelas dalam satuan waktu dalam upaya mencapai tujuan kompetensi (kognitif, afektif, dan keterampilan) selanjutnya dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan pembelajaran.²⁵

Dalam aktivitas belajar, harus diperhatikan pula strategi mengajar yang efektif dan sesuai untuk menyampaikan/menyajikan materi pelajaran. Strategi belajar mengajar tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pengajaran Expository

Dalam pengajaran ini “keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi, baik

²⁵ Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 162

secara lisan maupun tertulis”.²⁶ Siswa tidak dituntut untuk mengolah atau melakukan aktivitas lain kecuali menguasai materi. Contoh pengajaran ini adalah ceramah, demonstrasi, tugas membaca dan presentasi audio visual.

2) Pengajaran Interaktif

Dalam pengajaran ini terdapat dorongan yang disengaja ketika terjadi interaksi antara guru dan siswa. “Siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan”.²⁷ Pada dasarnya, dalam pendekatan ini siswa lebih aktif dan keterampilan berpikir ditingkatkan melalui unsur interaktif.

3) Pengajaran Diskusi atau Kelompok Kecil

Karakteristik pokok dari strategi ini melibatkan pembagian kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja relatif bebas untuk mencapai tujuan. Peran guru berubah, dari seorang pemberi pengetahuan menjadi koordinator aktivitas dan pengarah informasi.²⁸

4) Pengajaran Inkuiri atau Pemecahan Masalah

Ciri utama strategi ini adalah aktifnya siswa dalam penentuan jawaban dari berbagai pertanyaan serta pemecahan masalah.

²⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 107

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hamalik, *Dasar-dasar...*, 179

d. Sumber

Sumber belajar sering dikaitkan dengan media belajar. Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Sumber belajar dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan terutama dalam pembelajaran, di antaranya:

- 1) Buku dan bahan tercetak.
- 2) Perangkat lunak komputer.
- 3) Film dan kaset video.
- 4) Televisi dan proyektor.
- 5) Gambar dan grafik, dan lain-lain.

e. Evaluasi

Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. "Evaluasi atau penilaian dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka".²⁹ Dari evaluasi ini akan dapat diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik, dan pelaksanaan kurikulum oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam proses manajemen perencanaan kurikulum, pendidik mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kurikulum utamanya kurikulum yang dikelola desentralisasi. Pendidik turut berpartisipasi, bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan/semester/catur wulan, atau satuan pelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Pendidik turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum.

²⁹ *Ibid.*, 180

Karena pendidik sejak awal penyusunan kurikulum telah diikutsertakan, mereka akan memahami dan benar-benar menguasai kurikulumnya, dengan demikian pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar. Pendidik bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikiran, penyusun, pengembang dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum.³⁰

B. Pengembangan Kurikulum

1. Landasan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum sebagai arah yang berfungsi mengarahkan proses belajar mengajar tujuan yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi serta perubahan yang dinamis, maka kurikulum suatu perguruan tinggi perlu dinilai dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bondi Wiles Damayati dan Mudjiono mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi banyak hal yaitu; (1) Kemudahan suatu analisis tujuan, (2) rancangan suatu program, (3) penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan (4) peralatan dan evaluasi proses.

Melihat bahwa kegiatan pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang dimulai dari merancang sampai pada evaluasi, maka diperlukan perangkat dasar sebagai bahan pijakan agar pengembangan kurikulum dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan pengembangan kurikulum yang tepat dan dapat dijadikan dasar, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar yang perlu dipertahankan dan dikembangkan serta aturan yang berlaku.

³⁰ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, 2002

Menurut Sukmadinata, di antaranya landasan pengembangan kurikulum yaitu, (a) landasan fisiologis, dan (b) landasan psikologis.³¹

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah hakikat realitas ilmu pengetahuan, sistem nilai, nilai kebaikan, keindahan, dan hakikat pikiran yang ada dalam masyarakat. Antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lainnya akan berbeda landasan filosofinya, karena adanya perbedaan tata nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan ada dan berada di dalam masyarakat sehingga apa yang selayaknya diperlukan dan dikehendaki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan dikembangkan serta diselenggarakan melalui pendidikan di perguruan tinggi. Segala kehendak yang dimiliki oleh masyarakat merupakan sumber nilai yang memberikan arah pada pendidikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian segala bentuk wawasan yang ada dalam masyarakat merupakan wawasan pula bagi suatu pendidikan, Dengan kata lain bahwa falsafah hidup masyarakat merupakan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pendidikan.

b. Landasan Psikologis

Landasan ini didasarkan bahwa karakter psiko-fisik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Kondisi psikologis setiap individu karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa sejak lahir.

³¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Praktek dan Teori*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 38.

Hamalik juga mengemukakan beberapa landasan pengembangan kurikulum yaitu:

1. Tujuan filsafat pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional dan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan .
2. Landasan sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita
3. Perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan peserta didik.
4. Keadaan lingkungan dalam arti luas meliputi, lingkungan manusiawi, lingkungan kebudayaan termasuk iptek, dan lingkungan hidup serta lingkungan alam.
5. Kebutuhan pembangunan, yang mencakup pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam dan sebagainya.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa.³²

Mencermati kedua pendapat tersebut di atas, bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu proses penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak dapat dikerjakan dengan sembarangan, akan tetapi membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan atas hasil studi kelayakan, pemikiran dan penelitian yang mendalam.

c. Landasan Sosiologis-Teknologis dalam Pengembangan Kurikulum

Perguruan Tinggi berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat pedoman dalam proses pendidikan di perguruan tinggi harus

³²Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan...*, 19.

relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan demikian dalam konteks ini perguruan tinggi bukan hanya berfungsi untuk mewariskan kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat, akan tetapi juga perguruan tinggi berfungsi untuk mempersiapkan anak didik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, kurikulum bukan hanya berisi sebagai nilai suatu masyarakat akan tetapi bermuatan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya. Sehubungan dengan penentuan asas sosiologis-teknologis inilah, kita perlu mengkaji berbagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses menyusun dan mengembangkan suatu kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat selalu mengalami perubahan, bergerak menuju perkembangan yang semakin kompleks. Perubahan bukan hanya terjadi pada sistem nilai, akan tetapi juga pada pola kehidupan, struktur sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks tersebut, maka muncul pula berbagai kekuatan kelompok yang dapat memberikan tekanan terhadap penyelenggaraan dan praktek pendidikan termasuk di dalamnya tekanan-tekanan dalam proses pengembangan isi kurikulum sebagai alat dan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Kesulitan yang di hadapi oleh para pengembang kurikulum adalah manakala setiap kelompok sosial itu memberikan masukan danuntutannya yang berbeda sesuai dengan kepentingan kelompoknya, seperti misalnya tuntutan golongan agama, politik, militer, industri, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, pertentangan-pertentangan pun sering terjadi sehubungan dengan cara pandang yang berbeda tentang makna pendidikan setiap kelompok tersebut.

Misalkan, cara pandang kelompok agamawan atau kelompok budayawan yang lebih menekankan pendidikan perguruan tinggi sebagai proses penanaman budi pekerti, berbeda dengan cara pandang kelompok industriawan yang lebih menekankan pendidikan di perguruan tinggi sebagai wadah untuk membentuk generasi manusia yang siap pakai

dengan sejumlah keterampilan teknis sesuai dengan tuntutan industri. Cara pandang yang berbeda semacam ini tentu saja memunculkan kriteria keberhasilan yang berbeda pula, yang pada gilirannya tolak ukur keberhasilan itu tidak pernah memuaskan semua golongan sosial.

Walaupun dirasakan sangat susah, para pengembang kurikulum mestinya memperhatikan setiap tuntutan dan tekanan masyarakat yang berbeda itu. Oleh sebab itu, menyerap berbagai informasi yang di butuhkan masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Dalam konteks inilah pengembang kurikulum perlu menjalankan peran evaluatif dan peran kritisnya dalam menentukan muatan kurikulum.

Kemajuan IPTEK sebagai bahan pertimbangan penyusunan Kurikulum. Mengapa kemajuan teknologi harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kurikulum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berpikir manusia telah membawa umat manusia pada masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terciptanya produk-produk teknologi seperti teknologi transportasi, misalnya bukan hanya menyebabkan manusia bisa menjelajahi seluruh pelosok dunia, akan tetapi manusia mampu menjelajahi ruang angkasa tempat yang dahulu dibayangkannya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Demikian juga halnya dengan ditemukannya hasil teknologi informasi dan komunikasi, bukan hanya manusia dapat berhubungan secara langsung dengan orang yang tinggal di seberang sana, akan tetapi manusia dapat melihat berbagai peristiwa yang terjadi pada saat yang sama di seluruh belahan dunia. Namun demikian, segala kemajuan yang telah mampu diraih umat manusia itu, bukan tanpa masalah. Pada kenyataannya terdapat berbagai efek negatif yang justru yang sangat mencemaskan manusia itu sendiri.

Munculnya permasalahan-permasalahan baru ini menyebabkan kompleksitas tugas-tugas pendidikan yang diemban oleh perguruan

tinggi. Tugas perguruan tinggi semakin berat, dan kadang-kadang tidak mampu lagi melaksanakan semua tuntutan masyarakat. Sesuai dengan perubahan zaman, tugas-tugas dahulu bukan menjadi perguruan tinggi, kini diserahkan kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi bukan hanya bertugas menanamkan dan mewariskan, akan tetapi juga harus memberi keterampilan tertentu serta menanamkan budi pekerti dan nilai-nilai.

Asas-asas tersebut cukup kompleks dan tidak jarang memiliki hal-hal yang bertentangan, karenanya harus memerlukan seleksi.

Pada asas filosofis bukan hal yang mudah untuk menentukan tujuan umum pendidikan. Karena perlu memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hlm. "Falsafah yang berbeda-beda religius atau sekuler, demokratis atau otoriter, mempunyai tujuan tersendiri dan menentukan bahan pelajaran yang khusus untuk mewujudkan tujuan itu".³³

Dalam penentuan tujuan pendidikan tentunya berdasarkan "falsafah bangsa dan negara, falsafah lembaga pendidikan dan staf pengajar atau pendidik".³⁴ Setiap negara di dunia memiliki falsafah atau pandangan pokok mengenai pendidikan. Keberadaan kurikulum adalah untuk memelihara keutuhan dan persatuan bangsa dan negara. Persoalannya, bagaimana berupaya menyatukan beragam pandangan yang ada pada masyarakat ke dalam suatu kerangka pemikiran yang konsisten dalam upaya menyokong proses pengembangan kurikulum yang dapat disetujui oleh semua kalangan.³⁵

Dalam merumuskan falsafah lembaga pendidikan secara tertulis setidaknya harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:³⁶

³³ *Ibid*

³⁴ Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 15

³⁵ Idi, *Pengembangan Kurikulum...*, 71-72

³⁶ *Ibid.*, 72

- a. Alasan rasional mengenai eksistensi lembaga pendidikan itu.
- b. Prinsip pokok yang mendasarinya.
- c. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi.
- d. Prinsip-prinsip pendidikan mengenai hakikat anak/siswa, hakikat proses belajar mengajar, hakikat pengetahuan.

Dalam operasional kurikulum, peran pendidik memang sangat penting. Ia selalu terlibat dan karenanya peran falsafahnya dalam perencanaan, pengorganisasian dan penyampaian pelajaran merupakan suatu hal yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum sekolah bersangkutan. Pendidik profesional secara implisit selalu menempatkan dirinya untuk menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang dipikul orang tua, dan orang tuapun sangat mengharapkan anaknya untuk memiliki pendidikan yang baik dan profesional.³⁷

Asas sosiologi mempunyai peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Tiap masyarakat berlainan corak nilai-nilai yang dianutnya. Tiap anak akan berbeda latar belakang kebudayaannya. Perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam kurikulum. juga perubahan masyarakat akibat perkembangan IPTEK merupakan faktor pertimbangan dalam kurikulum.³⁸

Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan akan tetapi tidak lepas dari kekurangan ditinjau dari segi tertentu. selain itu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di suatu sekolah, bahkan yang satu dapat membantu atau melengkapi yang satu lagi.³⁹

³⁷ *Ibid.*, 73

³⁸ Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 13

³⁹ *Ibid.*, 14

Dalam memilih pengetahuan belajar yang akurat, psikologi secara umum sangat membantu. Teori-teori belajar, teori-teori kognitif, pengembangan emosional, dinamika group, perbedaan kemampuan individu, kepribadian, model formasi sikap dan perubahan, dan mengetahui motivasi, semuanya sangat relevan dalam merencanakan pengalaman-pengalaman pendidikan.⁴⁰

2. Proses Pengembangan Kurikulum

Kurikulum adalah sebuah rencana yang dibuat dengan mendasarkan berbagai kondisi yang ada. Oleh sebab itu proses pembuatan dan pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses berantai yang berkesinambungan antara proses yang satu dengan proses yang lain. Lebih lanjut Muhaimin mengemukakan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana pada intinya adalah upaya untuk menghasilkan lulusan, atau mengubah input peserta didik dari kondisi awal menjadi peserta didik yang memiliki kriteria ; 1) mampu memahami konsep yang mendasari standar kompetensi yang harus dikuasai, 2) mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi yang harus dicapai dengan cara dan prosedur yang benar serta hasil yang baik, dan 3) mampu mengaplikasikan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari (didalam maupun di luar sekolah). Dengan demikian kompetensi merupakan kombinasi yang baik dari penguasaan ilmu (*knowledge*), ketrampilan dalam melaksanakan pekerjaan (*skill*), dan sikap yang dituntut untuk menguasai suatu pekerjaan (*attitude*).

Hamalik, membagi proses pengembangan kurikulum dalam dua jenis proses, yakni pengembangan dalam arti perancangan (*engineering*)

⁴⁰ Idi, *Pengembangan Kurikulum...*, 80

dan pengembangan dalam arti konstruksi. Proses pengembangan dalam arti pertama, terdiri dari empat tahap; konstruksi ialah mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan pondasi tersebut; implementasi ialah pelaksanaan kurikulum; dan evaluasi ialah menilai kurikulum secara komperenhesif dan sistematis.

Pada umumnya para ahli kurikulum memandang kegiatan kurikulum sebagai suatu proses yang terus-menerus dan merupakan suatu siklus yang menyangkut beberapa komponen kurikulum yaitu komponen tujuan, bahan, kegiatan dan evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang komprehensif, menurut Olivia dalam Subandijah dikatakan sebagai proses yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Mengacu pada siklus pengembangan kurikulum tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan agar kurikulum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data informasi yang akurat, selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan kurikulum tidak sederhana selama ini dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum (TPK). Pengembangan kurikulum ternyata mempunyai rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan seksama. Ketika pengembang kurikulum tidak mengikuti aturan atau prosedur yang ditetapkan akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat kualitas pendidikan tidak mencapai hasil yang maksimal.

3. Model Pengembangan Kurikulum

Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum merupakan ulasan teoritis tentang pengembangan kurikulum secara menyeluruh ataupun hanya sebagian komponen kurikulum. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukmadinata berikut ini:⁴¹

- a. *The Administration model*. Model ini disebut juga line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Model ini memiliki langkah-langkah kerja antara lain: a) administrator pendidikan membentuk komisi mengarah, b) komisi pengarah (stering komite) merumuskan rencana umum dan landasan filosofis serta tujuan untuk seluruh wilayah sekolah, c) membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum secara operasional, d) membentuk komisi pengarah memeriksa hasil kerja komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu yang dianggap perlu penyempurnaan. Karena sifatnya yang datang dari atas, maka model ini juga disebut model "top down atau"line staff".
- b. *The grass roots model*. Upaya pengembangan model ini adalah yang berasal dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Ada empat prinsip yang digunakan dalam model ini yaitu, a) kurikulum akan bertambah baik kalau kompetensi profesi guru bertambah baik. b) kompetensi guru bertambah baik kalau guru menjadi personil-personil yang dilibatkan dalam perbaikan kurikulum, c) jika guru bersama-sama bertanggung jawab atas suatu yang menjadi tujuan yang dicapai, dalam

⁴¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan...*, 161-170.

memilih dan memecahkan masalah yang dihadapi serta dalam memutuskan dan menilai hasil, keterlibatan mereka akan lebih terjamin, d) sebagai orang yang bertemu dalam kelompok tatap muka mereka akan mengerti satu sama lain dan membantu adanya konsensus dalam prinsip-prinsip dasar, tujuan dan perencanaan.

- c. *Beauchamp's system*. Teori ini diprakarsai oleh Beauchamps, yang mengemukakan ada lima langkah penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu, a) menentukan arena pengembangan kurikulum yang dilakukan, yang berupa kelas, system persekolahan regional atau nasional, b) menetapkan personalia, yaitu siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum, c) mengorganisasikan dan menentukan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi penentuan tujuan, materi pelajaran dan kegiatan belajar secara sistematis di sekolah, d) melaksanakan kurikulum yang membutuhkan kesiapan semua pihak, mulai dari guru, siswa fasilitas, biaya dan manajerial dari pimpinan sekolah dan administrator, e) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar siswa dan keseluruhan sistem kurikulum.
- d. *The demonstration model*. Model ini juga bersifat *grass roots*, atau dari bawah yang diprakarsai oleh guru dan bekerjasama dengan para ahli. Model ini pada umumnya berskala kecil, hanya mencakup keseluruhan komponen kurikulum.
- e. *Taba's inverted model*. Langkah-langkah pengembangan kurikulum model Taba yaitu: mengadakan unit-unit eksperimen bersama-sama guru, mengadakan revisi dan konsolidasi, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan

konsolidasi, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum, dan implementasi dan diseminasi.

- f. *Roger's interpersonal relations model*. Rogers menawarkan empat langkah pengembangan kurikulum yaitu: pemilihan target dan sistem pendidikan, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran, dan melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif.
- g. *Emerging technical models*. Model ini melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Ada dua langkah yang dilakukan yaitu: a) mengadakan kajian secara saksama tentang masalah kurikulum, berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor, kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut, b) implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama.
- h. *Emerging technical models*. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis, juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum.

4. Proses Pengembangan Kurikulum

Kurikulum adalah sebuah rencana yang dibuat dengan mendasarkan berbagai kondisi yang ada. Oleh sebab itu proses pembuatan dan pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses berantai yang berkesinambungan antara proses yang satu dengan proses yang lain. Lebih lanjut Muhaimin mengemukakan bahwa kurikulum sebagai suatu rencana pada intinya adalah upaya untuk menghasilkan lulusan, atau mengubah input peserta didik dari

kondisi awal menjadi peserta didik yang memiliki kriteria; 1) mampu memahami konsep yang mendasari standar kompetensi yang harus dikuasai, 2) mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi yang harus dicapai dengan cara dan prosedur yang benar serta hasil yang baik, dan 3) mampu mengaplikasikan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari (di dalam maupun di luar sekolah). Dengan demikian kompetensi merupakan kombinasi yang baik dari penguasaan ilmu (*knowledge*), keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan (*skill*), dan sikap yang dituntut untuk menguasai suatu pekerjaan (*attitude*).

Hamalik, membagi proses pengembangan kurikulum dalam dua jenis proses, yakni pengembangan dalam arti perancangan (*engineering*) dan pengembangan dalam arti konstruksi. Proses pengembangan dalam arti pertama, terdiri dari empat tahap; konstruksi ialah mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan fondasi tersebut; implementasi ialah pelaksanaan kurikulum; dan evaluasi ialah menilai kurikulum secara komprehensif dan sistematis.

Pada umumnya para ahli kurikulum memandang kegiatan kurikulum sebagai suatu proses yang terus-menerus dan merupakan suatu siklus yang menyangkut beberapa komponen kurikulum yaitu komponen tujuan, bahan, kegiatan dan evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang komprehensif, menurut Olivia dalam Subandijah dikatakan sebagai proses yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Mengacu pada siklus pengembangan kurikulum tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah pengembangan komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan agar kurikulum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data informasi yang akurat, selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan kurikulum tidak sederhana selama ini dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum (TPK). Pengembangan kurikulum ternyata mempunyai rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan seksama. Ketika pengembang kurikulum tidak mengikuti aturan atau prosedur yang ditetapkan akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat kualitas pendidikan tidak mencapai hasil yang maksimal.

C. Pengembangan Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, ada dua istilah yang hampir sama bentuknya dan juga sering digunakan, yaitu *paedagogie* dan *paedagogik*. *Paedagogie* berarti "pendidikan", sedangkan *paedagogik* artinya "ilmu pendidikan". Istilah ini berasal dari kata *pedagogia* (Yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak.⁴²

Pendidikan menurut Carter V. Good dimaknai oleh Djumransjah dalam bukunya *Filsafat Pendidikan* sebagai proses sosial yang dapat mempengaruhi individu. Pendidikan menentukan cara hidup seseorang, karena terjadinya modifikasi dalam pandangan seseorang disebabkan pula oleh pengaruh terjadinya interaksi antara kecerdasan, perhatian, pengalaman, dan sebagainya. Pengertian ini hampir sama dengan apa yang dikatakan Godfrey Thompson bahwa

⁴²M. Djumransjah, *Filsafat Pendidikan*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 21

pendidikan merupakan pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya.⁴³

Para ahli filsafat pendidikan menyatakan bahwa dalam merumuskan pengertian pendidikan sebenarnya sangat tergantung kepada pandangan terhadap manusia; hakikat, sifat-sifat atau karakteristik, dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Pengertian pendidikan dalam arti teoritis filosofis adalah pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk memecahkan dan menyusun teori-teori baru dengan mendasarkan kepada pemikiran normatif, spekulatif, rasional empiris, rasional filosofis maupun historis filosofis. Sedangkan pendidikan dalam arti praktik adalah suatu proses pemindahan atau transformasi pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subyek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, serta membudayakan manusia melalui transformasi nilai-nilai yang utama.⁴⁴

Brubacher, dalam bukunya *Modern Philosophies of Education*, menyatakan: "*Education is the organized development and equipment of the all powers of human being, moral, intellectual, and physical, by and for their individual and social uses, directed toward the union of these activities with their creator as their final end*". Artinya: pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisir dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual maupun jasmani, oleh dan untuk kepribadian individualnya dan kegunaan masyarakatnya, yang diarahkan untuk menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya yang akhir.⁴⁵

⁴³*Ibid.*, hlm. 24

⁴⁴Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 98-99

⁴⁵M. Bashori Muchsin, et. all., *Pendidikan Islam Humanistik: Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 2-3

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para tokoh UNESCO bahwa "*Education is now engaged is preparation for a type society which does not yet exist*". Atau, sekarang ini pendidikan sibuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang belum ada.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa ciri atau unsur umum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara.
- b. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana untuk memilih isi (bahan materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai.
- c. Kegiatan tersebut dapat diberikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, berupa pendidikan jalur sekolah (formal) dan pendidikan jalur luar sekolah (informal dan nonformal).

Dari berbagai pengertian pendidikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap

⁴⁶M. Djumransjah, *Filsafat Pendidikan ...*, hlm. 22

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 28

melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan bantuan orang lain. Adapun kegiatan bimbingan atau pertolongan tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga (informal), masyarakat (non formal), maupun di lingkungan sekolah (formal).

Pada hakikatnya pendidikan adalah suatu proses pembentukan perilaku manusia, secara intelektual untuk menguasai ilmu pengetahuan, secara emosional untuk menguasai diri, dan secara moral sebagai pendalaman dan penghayatan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

2. Pengertian Karakter

Dalam kamus Inggris-Indonesia, John M. Echols dan Hassan Shadly menyebutkan bahwa karakter berasal dari bahasa Inggris yaitu *Character* yang berarti watak, karakter atau sifat.⁴⁸

Dalam kamus psikologi sebagaimana dikutip oleh M. Furqon Hidayatullah, menyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang; biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.⁴⁹

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut Tadkiroatun Musfiroh karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviours*), motivasi (*motivations*), dan ketrampilan (*skills*).⁵⁰

⁴⁸John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 107

⁴⁹M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), hlm. 12

⁵⁰Akhmad Sudrajat, "Tentang Pendidikan: Apakah Pendidikan Karakter Itu?" dalam <http://ahkmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/>, diakses 08 Mei 2012

Masnur Muslich mengutip dari Winnie yang juga dipahami oleh Ratna Megawangi, menyatakan bahwa istilah karakter diambil dari bahasa Yunani yang berarti *to mark* atau menandai. Istilah ini lebih fokus pada tindakan atau tingkah laku. Ada dua pengertian tentang karakter. *Pertama*, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanasifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanasifestasikan karakter mulia. *Kedua*, istilah karakter erat kaitannya dengan *personality*. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sudah sesuai dengan kaidah moral.⁵¹

Akar dari semua tindakan yang jahat dan buruk, tindakan kejahatan, terletak pada hilangnya karakter. Karakter yang kuat adalah sandangan fundamental yang memberikan kemampuan kepada populasi manusia untuk hidup bersama dalam kedamaian serta membentuk dunia yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan, yang bebas dari kekerasan dan tindakan-tindakan tidak bermoral.⁵²

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama

⁵¹Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan kedua, 2011), hlm. 71

⁵²Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan kedua, 2012), hlm.41

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun bertindak.⁵³

Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak atau budi pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau budi pekerti bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berbudi pekerti atau berakhlak, sebaliknya bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa yang tidak atau kurang berakhlak / tidak memiliki standar norma dan perilaku yang baik.

M. Furqon mengutip dari Aa Gym mengemukakan bahwa karakter itu terdiri dari empat hlm. *Pertama*, karakter lemah; misalnya penakut, tidak berani mengambil resiko, pemalas, belum apa-apa sudah menyerah, dan sebagainya. *Kedua*, karakter kuat; contohnya tangguh, ulet, mempunyai daya juang yang tinggi atau pantang menyerah. *Ketiga*, karakter jelek; misalnya licik, egois, serakah, sombong, pamer, dan sebagainya. *Keempat*, karakter baik; kebalikan dari karakter jelek. Nilai-nilai utama yang menjadi pilar pendidikan dalam membangun karakter kuat adalah amanah dan keteladanan.⁵⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, karakter seseorang akan membawa dampak pada sekelilingnya. Orang-orang dengan karakter kuat dapat menjadi pemimpin dan panutan sekelilingnya. Orang-orang yang sukses memiliki banyak karakter positif. Orang-orang berkarakter positif umumnya mempunyai kebiasaan berusaha mencapai keunggulan, artinya berusaha dengan tekun dan terus

⁵³*Ibid.*, hlm.41-42

⁵⁴M. Furqon Hidayatullah, *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas*. (Surakarta: Yuma Pustaka, cetakan ketiga, 2010), hlm. 10

menerus guna mencapai keunggulan dalam hidup. Hal ini mengandung pengertian selalu berusaha untuk menjaga perkembangan diri, yaitu dengan meningkatkan kualitas keimanan, akhlak, hubungan dengan sesama manusia, dan memanfaatkannya untuk mewujudkan motto (misi) kehidupan.⁵⁵

Sejalan dengan konsep di atas, Dra. Ratna Elliyawati, M. Psi., membagi dua kecenderungan dari karakter anak-anak, yaitu karakter sehat dan tidak sehat. Anak berkarakter sehat bukan berarti tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif, melainkan perilaku itu masih wajar.⁵⁶

Jadi, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa, yang juga dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter dapat juga dimaknai sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia *insan kamil*. Penanaman nilai kepada warga sekolah maknanya bahwa pendidikan karakter baru akan efektif jika tidak hanya siswa, tetapi juga para guru, kepala sekolah

⁵⁵Moh. Said, *Pendidikan Karakter di Sekolah: What, How dan Why tentang Pendidikan Karakter*. (Surabaya: JePe Press Media Utama, 2011), hlm. 1-2

⁵⁶Najib Sulhan, *Pendidikan Berbasis Karakter: Sinergi antara Sekolah dan Rumah dalam Membentuk Karakter Anak*. (Surabaya: JePe Press Media Utama, cetakan kedua, 2011), hlm. 2

dan tenaga non-pendidik di sekolah semua harus terlibat dalam pendidikan karakter.

Dalam pendidikan karakter, ada dua paradigma dasar, yaitu:

- 1) *Pertama*, paradigma yang memandang pendidikan karakter dalam cakupan pemahaman moral yang sifatnya lebih sempit (*narrow scope to moral education*). Pada paradigma ini disepakati telah adanya karakter tertentu yang tinggal diberikan kepada peserta didik;
- 2) *Kedua*, melihat pendidikan dari sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih luas. Paradigma ini memandang pendidikan karakter sebagai sebuah pedagogi, menempatkan individu yang terlibat dalam dunia pendidikan sebagai perilaku utama dalam pengembangan karakter. Paradigma memandang peserta didik sebagai agen tafsir, penghayat sekaligus pelaksana nilai melalui kebebasan yang dimilikinya.⁵⁷

Pendidikan karakter yang berbasis Islam, gabungan antara keduanya, yaitu menanamkan karakter tertentu sekaligus memberi benih agar peserta didik mampu menumbuhkan karakter khasnya pada saat menjalani kehidupannya. Hanya menjalani sejumlah gagasan atau model karakter saja tidak akan membuat peserta didik menjadi manusia kreatif yang tahu bagaimana menghadapi perubahan zaman, tetapi melalui gabungan dua paradigma ini, pendidikan karakter akan bisa terlihat dan berhasil bila kemudian seseorang peserta didik tidak hanya akan memahami pendidikan nilai sebagai sebuah bentuk pengetahuan, namun juga menjadikannya sebagai bagian dari hidup dan secara sadar hidup berdasar pada nilai tersebut.

⁵⁷Bambang Q-Anees dan Adang Hambali, *Pendidikan Karakter ...*, hlm. 103

D. Tujuan Pendidikan Karakter

UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵⁸

Tujuan merupakan salah satu pokok dalam pendidikan, karena tujuan dapat menentukan setiap gerak, langkah, dan aktivitas dalam proses pendidikan. Muhammad Said mengemukakan bahwa tujuan pendidikan merupakan garis akhir yang hendak dicapai. Pembahasan tentang tujuan pendidikan senantiasa berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Dengan kata lain, tujuan pendidikan dapat ditafsirkan sebagai turunan dari tujuan hidup orang dewasa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan merupakan alat untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.⁵⁹

Lebih lanjut Hasan Al-Banna menegaskan bahwa tujuan pendidikan yang paling pokok atau fundamental adalah mengantar anak didik agar mampu memimpin dunia, dan membimbing manusia lainnya kepada ajaran Islam yang syamil atau komprehensif, serta memperoleh kebahagiaan di jalan Islam.⁶⁰

⁵⁸Undang-Undang Republik Indonesia ..., hlm. 76

⁵⁹Triyo Supriyatno, *Humanitas Spiritual dalam Pendidikan*. (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 132

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 133

Sedangkan dalam perspektif manusia sebagai makhluk sosial, tujuan pendidikan dirumuskan dalam bentuk citra masyarakat ideal, seperti: warga masyarakat, warga negara atau warga dunia yang lain, terciptanya masyarakat madani, *al-mujtama al-fadhilah* (Al-Farabi), masyarakat utama (Muhammadiyah), dan lain sebagainya.⁶¹

Socrates berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi *good and smart*. Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad SAW, sang Nabi terakhir dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik (*good character*). Berikutnya ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yaitu pembentukan kepribadian manusia yang baik.

Tokoh pendidikan barat yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, Brooks, dan Goble seakan menggemakan kembali gaung yang disuarakan Socrates dan Muhammad SAW, bahwa moral, akhlak atau karakter adalah tujuan yang tak terhindarkan dari dunia pendidikan. Begitu juga dengan Marthin Luther King menyetujui pemikiran tersebut dengan mengatakan "*Intelligence plus character, that is the true aim of education*". Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan yang benar dari pendidikan.⁶²

Berkaitan dengan pendidikan karakter, bahwa sesungguhnya pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk setiap pribadi menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai yang utama, terutama dinilai dari perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada pemahamannya. Dengan demikian, hal yang paling penting dalam

⁶¹Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis, dan Spiritualis*. (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 50

⁶²Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter ...*, hlm.30

pendidikan karakter ini adalah menekankan peserta didik untuk mempunyai karakter yang baik dan diwujudkan dalam perilaku.⁶³

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pada tingkat institusi, pendidikan karakter mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat.⁶⁴

Menurut Yahya Khan, pendidikan karakter mempunyai tujuan sebagai berikut:⁶⁵

1. Mengembangkan potensi anak didik menuju *self actualization*;
2. Mengembangkan sikap dan kesadaran akan harga diri;
3. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik, merupakan manifestasi pengembangan potensi akan membangun *self concept* yang menunjang kesehatan mental;
4. Mengembangkan pemecahan masalah;
5. Mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok kecil, untuk membantu meningkatkan berpikir kritis dan kreatif;

⁶³Akhmad Muhaimin Azzet, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 16

⁶⁴Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter ...*, hlm. 81

⁶⁵Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan*. (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 17

6. Menggunakan proses mental untuk menentukan prinsip ilmiah serta meningkatkan potensi intelektual;
7. Mengembangkan berbagai bentuk metaphor untuk membuka intelegensi dan mengembangkan kreativitas.

Ratna Megawangi menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan karakter yang menjadi misi utama pendidikan karakter. Tujuan-tujuan tersebut bermaksud untuk membentuk anak-anak dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Membangun dan membentuk karakter anak yang mempunyai intelektualitas dan kematangan emosi yang dibingkai dengan nilai-nilai ruhiyah;
- 2) Membantu anak mengembangkan kecerdasan yang optimal dalam aspek kognitif, emosional, dan spiritual (*multiple intelligences*);
- 3) Membantu anak mencapai keseimbangan fungsional otak kiri dan otak kanan yang dibingkai dengan nilai-nilai ruhiyah;
- 4) Menguasai kecakapan hidup (*life skill*): *problem solver*, komunikator yang efektif, mudah beradaptasi, mampu menghargai tantangan, dan berani mengambil resiko.⁶⁶

Artinya bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan kemanusiaan yang bertujuan menjadikan manusia “baik”. Menjadikan manusia “baik” tanpa syarat apapun. Menjadikan warga negara yang “baik” tanpa embel-embel syarat agama, sosial, ekonomi, budaya, ras, politik, dan hukum. Pendidikan karakter seperti ini sejalan dengan cita-cita kemandirian manusia (*moral otonomy*) dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan karakter yang sukses akan sama dengan tujuan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik dalam ranah multikultural, multietnis, multi bahasa, multi religi di era globalisasi seperti sekarang ini.

⁶⁶ Ibid., hlm. 20-23

Dalam konteks pendidikan karakter, kami melihat bahwa kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan dalam berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan pada peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdikan kepada Tuhan yang menciptakan, kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama.⁶⁷

Dalam arti luas bahwa tujuan pendidikan karakter adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar, dan cenderung memiliki tujuan hidup. Pendidikan karakter yang efektif ditemukan dalam lingkungan sekolah yang memungkinkan semua peserta didik menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting.

Adapun pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan;

⁶⁷Dharma Kesuma, et. all., *Pendidikan Karakter ...*, hlm. 7

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 9

- 2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah;
- 3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersamaan.

Manusia secara natural memang memiliki potensi di dalam dirinya untuk bertumbuh dan berkembang mengatasi keterbatasan dirinya dan keterbatasan budayanya. Di lain pihak manusia juga tidak dapat abai terhadap lingkungan sekitar dirinya. Tujuan pendidikan karakter semestinya diletakkan dalam kerangka gerak dinamis dialektis, berupa tanggapan individu atas impuls natural (fisik dan psikis), sosial, kultural yang melingkupinya, untuk dapat menempa diri menjadi sempurna sehingga potensi-potensi yang ada dalam dirinya berkembang secara penuh yang membuatnya semakin menjadi manusiawi. Semakin menjadi manusiawi berarti ia juga semakin menjadi makhluk yang mampu berelasi secara sehat dengan lingkungan di luar dirinya tanpa kehilangan otonomi dan kebebasannya sehingga ia menjadi manusia yang bertanggung jawab.

E. Dasar Pembentukan Karakter

Dalam berbagai literatur, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadikan karakter seseorang. Adapun gen hanya merupakan salah satu faktor penentu saja. Jika karakter merupakan seratus persen turunan dari orang tua, tentu saja karakter tidak bisa dibentuk. Namun jika gen hanyalah menjadi salah satu faktor dalam pembentukan karakter, kita akan meyakini bahwa karakter bisa dibentuk. Dan orang tua lah yang memiliki andil besar dalam membentuk karakter anaknya. Orang tua di sini adalah yang mempunyai hubungan genetis, yaitu

orang tua kandung, atau orang tua dalam arti yang lebih luas orang-orang dewasa yang berada di sekeliling anak dan memberi peran yang berarti dalam kehidupan anak.⁶⁹

Dalam Islam, faktor genetis ini juga diakui keberadaannya. Salah satu contohnya adalah pengakuan Islam tentang alasan memilih calon istri atas dasar keturunan. Rasul pernah bersabda yang intinya menyebutkan bahwa kebanyakan orang menikahi seorang wanita karena faktor rupa, harta, keturunan, dan agama. Meskipun Islam menyatakan bahwa yang terbaik adalah menikahi wanita karena pertimbangan agamanya, namun tetap saja bahwa Islam meyakini adanya kecenderungan bahwa orang menikahi karena ketiga faktor selain agama itu. Salah satunya adalah keturunan. Boleh jadi orang yang menikahi wanita karena pertimbangan keturunan disebabkan oleh adanya keinginan memperoleh kedudukan dan kehormatan sebagaimana orang tua si perempuan. Atau bisa juga karena ingin memiliki keturunan yang mewarisi sifat-sifat orang tua istrinya.⁷⁰

Dahulu, ada kebiasaan di masyarakat Arab yang memungkinkan seorang suami bisa menyuruh istrinya berhubungan intim dengan lelaki lain yang ditokohkan hanya demi ingin memiliki anak yang berpotensi menjadi tokoh besar. Seorang bapak juga bisa demikian, menyuruh anak gadisnya melakukan hal demikian untuk tujuan serupa. Di Jawa, orang-orang zaman dulu sangat bangga jika anaknya yang dijadikan selir oleh raja. Sebab dengan dijadikan selir, akan membuat keturunan mereka berikutnya menjadi keturunan

⁶⁹Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter ...*, hlm. 17-18

⁷⁰Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), hlm. 6

raja. Persoalan ini pula yang menyebabkan tradisi perempuan melamar laki-laki di daerah minang. Laki-laki bangsawan dan terkenal akan paling banyak dilamar oleh para orang tua gadis. Tentu tujuan utamanya adalah mendapatkan garis keturunan atau gen para bangsawan, di samping ketokohan dan popularitas.⁷¹

Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola pikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam.⁷²

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Dari sekian banyak faktor, para ahli menggolongkannya kedalam dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.⁷³

1. Faktor Intern

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor intern ini, di antaranya adalah:

a. Insting atau Naluri

Setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri (insting). Naluri merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. Pengaruh naluri pada seseorang sangat tergantung pada

⁷¹*Ibid.*, hlm. 7-8

⁷²Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter ...*, hlm. 17

⁷³Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi ...*, hlm. 19-22

penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan (*degradasi*), tetapi juga dapat mengangkat kepada derajat yang tinggi (mulia), jika naluri disalurkan kepada hal yang baik dengan tuntunan kebenaran. Karakter berkembang berdasarkan kebutuhan menggantikan insting kebinatangan yang hilang ketika manusia berkembang tahap demi tahap.⁷⁴

b. Adat atau Kebiasaan (*Habit*)

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi akhlak (karakter) sangat erat sekali dengan kebiasaan. Yang dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan membina akhlak (karakter).

c. Kehendak atau Kemauan (*Iradah*)

Kemauan adalah kemauan untuk melangsungkan segala ide dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak mau tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. Salah satu kekuatan yang berlandung dibalik tingkah laku adalah kehendak atau kemauan keras (*azam*). Itulah yang menggerakkan dan merupakan kekuatan yang mendorong manusia dengan sungguh-sungguh untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari kehendak itu menjelma suatu niat yang baik dan buruk dan tanpa kemauan pula semua ide, keyakinan kepercayaan pengetahuan menjadi pasif tak akan ada artinya atau pengaruhnya bagi kehidupan.

⁷⁴Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 110

d. Suara Batin atau Suara Hati

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan jika tingkah laku manusia berada diambang bahaya dan keburukan, kekuatan tersebut adalah suara batin atau suara hati (*dhamir*). Suara batin berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan berusaha untuk mencegahnya, di samping untuk melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dididik dan dituntun untuk menaiki jenjang kekuatan rohani.

e. Keturunan

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia. Sifat-sifat yang diturunkan itu pada garis besarnya ada dua macam, yaitu:

- 1) Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat saraf orang tua yang dapat diwariskan kepada anaknya;
- 2) Sifat ruhaniyah, yakni lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak cucunya.

2. Faktor Ekstern

Selain faktor intern yang dapat mempengaruhi karakter seseorang, juga terdapat faktor ekstern, di antaranya adalah:

a. Pendidikan

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter seseorang, sehingga baik dan buruknya akhlak (karakter) seseorang tergantung pada pendidikan. Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri yang terdapat pada seseorang dapat dibangun baik dan terarah. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu dimanifestasikan melalui berbagai media,

baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di keluarga, dan pendidikan non formal pada masyarakat.

b. Lingkungan

Dalam hal ini lingkungan dibagi ke dalam dua bagian:

1) Lingkungan yang bersifat kebendaan

Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. Lingkungan alam ini dapat mematahkan dan mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang.

2) Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian

Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat membentuk kepribadiannya menjadi baik, begitu pula sebaliknya, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang kurang mendukung dalam pembentukan akhlaknya, maka setidaknya dia akan terpengaruh lingkungan tersebut.

Akhir-akhir ini ditemukan bahwa faktor yang paling penting berdampak pada karakter seseorang di samping gen ada faktor lain, yaitu makanan, teman, orang tua, dan tujuan merupakan faktor terkuat dalam mewarnai karakter seseorang. Dengan demikian jelaslah bahwa karakter itu dapat dibentuk.⁷⁵

Dasar pembentukan karakter itu adalah nilai baik dan buruk. Nilai baik disimbolkan dengan nilai Malaikat dan nilai buruk disimbolkan dengan nilai Setan. Karakter manusia merupakan hasil tarik-menarik antara nilai baik dalam bentuk energi positif dan nilai

⁷⁵Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter ...*, hlm. 20

buruk dalam bentuk energi negatif. Energi positif itu berupa nilai-nilai etis religius dan bersumber dari keyakinan kepada Tuhan, sedangkan energi negatif itu berupa nilai-nilai yang a-moral yang bersumber dari *thaghut* (Setan). Nilai-nilai etis itu berfungsi sebagai sarana pemurnian, pensucian dan pembangkitan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati (hati nurani).⁷⁶

Energi positif itu berupa:

- 1) Kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual berupa *iman, islam, ihsan* dan *taqwa*, yang berfungsi membimbing dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk menggapai keagungan dan kemuliaan (*ahsani taqwim*);
- 2) Kekuatan potensi manusia positif, berupa '*aqlus salim* (akal yang sehat), *qalbun salim* (hati yang sehat), *qalbun munib* (hati yang kembali, bersih, suci dari dosa), dan *nafsul muthmainnah* (jiwa yang tenang), yang kesemuanya itu merupakan modal insani atau sumber daya manusia yang memiliki kekuatan luar biasa;
- 3) Sikap dan perilaku etis. Sikap dan perilaku etis ini merupakan implementasi dari kekuatan spiritual dan kekuatan kepribadian manusia yang kemudian melahirkan konsep-konsep normatif tentang nilai-nilai budaya etis. Sikap dan perilaku etis itu meliputi: *istiqomah* (integritas), *ikhlas, jihad* dan amal saleh.⁷⁷

Energi positif tersebut dalam perspektif individu akan melahirkan orang yang berkarakter baik, yaitu orang yang bertakwa, memiliki integritas (*nafsul muthmainnah*) dan beramal saleh.

⁷⁶Tobroni, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam" dalam <http://tobroni.staff.umm.ac.id/2010/01/20/pendidikan-karakter-dalam-perspektif-islam-pendahuluan/>

⁷⁷*Ibid.*,

Aktualisasi orang yang berkualitas ini dalam hidup dan bekerja akan melahirkan akhlak budi pekerti yang luhur karena memiliki *personality* (integritas, komitmen, dan dedikasi), *capacity* (kecakapan), dan *competency* yang bagus pula (profesional).

Kebalikan dari energi positif di atas adalah energi negatif. Energi negatif itu disimbolkan dengan kekuatan materialistik dan nilai-nilai *thaghut* (nilai-nilai destruktif). Kalau nilai-nilai etis berfungsi sebagai sarana pemurnian, pensucian, dan pembangkitan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati (hati nurani), nilai-nilai material (*thaghut*) justru berfungsi sebaliknya, yaitu pembusukan dan penggelapan nilai-nilai kemanusiaan.

Hampir sama dengan nilai positif, energi negatif terdiri dari:

- 1) Kekuatan *thaghut*. Kekuatan *thaghut* itu berupa *kufur* (kekafiran), *munafiq* (kemunafikan), *fasiq* (kefasikan) dan *syirik* (kesyirikan) yang kesemuanya itu merupakan kekuatan yang menjauhkan manusia dari makhluk etis dan kemanusiaannya yang hakiki (*ahsani taqwim*) menjadi makhluk yang serba material (*asfala safilin*);
- 2) Kekuatan kemanusiaan negatif, yaitu pikiran *jahiliyah* (pikiran sesat), *qalbun maridh* (hati yang sakit, tidak merasa), *qalbun mayyit* (hati yang mati, tidak punya nurani), dan *nafsul lawwamah* (jiwa yang tercela), yang kesemuanya itu akan menjadikan manusia menghamba kepada *ilah-ilah* selain Allah, berupa harta, sex, dan kekuasaan (*thaghut*);
- 3) Sikap dan perilaku tidak etis. Sikap dan perilaku tidak etis ini merupakan implementasi dari kekuatan *thaghut* dan kekuatan kemanusiaan negatif yang kemudian melahirkan konsep-konsep normatif tentang nilai-nilai budaya tidak etis

(budaya busuk). Sikap dan perilaku tidak etis itu meliputi: *takabur* (congkak), *ḥubbud dunya* (materialistik), *zhalim* (aniaya), dan *'amal sayyiat* (destruktif).⁷⁸

Energi negatif tersebut dalam perspektif individu akan melahirkan orang yang berkarakter buruk, yaitu orang yang puncak keburukannya meliputi: *syirik*, *nafsul lawwanah* dan *'amal sayyiat* (destruktif). Aktualisasi orang yang bermental *thaghut* ini dalam hidup dan bekerja akan melahirkan perilaku tercela, yaitu orang yang memiliki *personality* tidak bagus (hipokrit, penghianat, dan pengecut) dan orang yang tidak mampu mendayagunakan kompetensi yang dimiliki.

Pembentukan kepribadian manusia melalui pendidikan budi pekerti juga tidak bisa terlepas dari faktor lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat. Dalam kaitan ini, maka nilai-nilai akhlak mulia hendaknya ditanamkan sejak dini melalui pemudayaan dan pembiasaan. Kebiasaan itu kemudian dikembangkan dan diaplikasikan dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Di sini diperlukan kepeloporan dan para pemuka agama serta lembaga-lembaga keagamaan yang dapat mengambil peran terdepan dalam membina akhlak mulia di kalangan umat.⁷⁹

Demikian pula, jika keteladanan menjadi sumber pembentukan akhlak, maka tidak mustahil karakter anak akan terbentuk dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan Prof. H. Imam Suprayogo, bahwa kelemahan pendidikan saat ini berjalan secara paradoks. Jika pendidikan adalah proses peniruan, pembiasaan, dan penghargaan, maka yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari justru

⁷⁸*Ibid.*,

⁷⁹Said Aqil Husain Al-Munawar, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 27

sebaliknya. Uswah hasanah yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak ternyata tidak mudah diperoleh. Orang tua demikian mudah beralasan tatkala meninggalkan kegiatan yang dianjurkan agar dilaksanakan oleh anak-anaknya.⁸⁰

Karakter adalah sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup. Karakter merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus didasari oleh Pancasila. Sementara itu sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang multi suku, multi ras, multi bahasa, multi adat, dan tradisi. Untuk tetap menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kesadaran untuk menjunjung tinggi *Bhineka Tunggal Ika* merupakan suatu syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena pilihan lainnya adalah runtuhnya negara ini.

Lebih luas dinyatakan bahwa, pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia diidentifikasi berasal dari empat dasar.⁸¹ *Pertama*, agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Secara politis,

⁸⁰Imam Suprayogo, *Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an*. (Malang: Aditya Media dan UIN Malang Press, 2004), hlm. 13-14

⁸¹Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter ...*, hlm. 73

kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

Kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Karakter yang berlandaskan Pancasila maknanya adalah setiap aspek karakter harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif, yakni (1) Bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Bangsa yang menjunjung tinggi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; (3) Bangsa yang mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; (4) Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (5) Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan.⁸²

Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi dasar nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Keempat, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan nasional memuat berbagai nilai

⁸²Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter ...*, hlm. 22-24

kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber atau dasar yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

F. Konsep Dasar dan Implementasi Nilai-Nilai Karakter di Perguruan Tinggi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan.

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*).

Nilai-nilai karakter yang diterapkan di perguruan tinggi hanya memilih nilai-nilai karakter inti (*core values*) yang akan dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter, khususnya pada masing-masing jurusan/program studi. Artinya, karakter seorang peserta didik sangat ditentukan oleh perangai dari otak (*head, mind*) dan hati (*heart*). Hal itu bukan berarti aspek olahraga (kinestetika), olah rasa dan karsa tidak ikut menentukan, tetapi keduanya ditentukan oleh bagaimana pikiran

dan hati berproses. Rasa dan karsa jelas bersumber dari proses yang berlangsung dalam kalbu (hati). Timbulnya motivasi karena adanya proses di dalam hati, sedangkan gerakan raga ditentukan oleh hasil proses di otak. Perangai tersebut ada yang bersifat personal tanpa harus terkait dan ditentukan oleh bagaimana pengaruh komunikasi dengan orang lain, tetapi ada juga yang terbentuk sebagai hasil komunikasi dengan orang lain sehingga bersifat sosial.

Keempat nilai-nilai karakter inti di atas menjadi dasar implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yaitu: terintegrasi dalam pembelajaran, manajemen jurusan dan atau program studi, serta pada kegiatan kemahasiswaan. Muchlas Samani (2011: 138-140) menjelaskan bahwa langkah pendidikan karakter meliputi perancangan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. *Pertama*, perancangan. Beberapa hal perlu dilakukan dalam tahap penyusunan rancangan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di kampus yang dapat merealisasikan pendidikan karakter yang perlu dikuasai, dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan karakter peserta didik direalisasikan dalam tiga kelompok kegiatan, yaitu (1) terpadu dengan pembelajaran pada semua matakuliah; (2) terpadu dengan manajemen PT; dan (3) terpadu melalui kegiatan kemahasiswaan.
- b. Mengembangkan materi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan di jurusan/ program studi.
- c. Mengembangkan rancangan pelaksanaan setiap kegiatan di jurusan/ prodi (tujuan, materi, fasilitas, jadwal, pengajar/ fasilitator, pendekatan pelaksanaan, evaluasi).
- d. Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program pembentukan karakter di perguruan tinggi.

Perencanaan kegiatan program pendidikan karakter di perguruan tinggi mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang setidaknya memuat unsur-

unsur: tujuan, sasaran kegiatan, substansi kegiatan, pelaksana kegiatan dan pihak-pihak yang terkait, mekanisme pelaksanaan, keorganisasian, waktu dan tempat, serta fasilitas pendukung.

Kedua, implementasi. Pendidikan karakter di perguruan tinggi dilaksanakan dalam tiga kelompok kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pembentukan karakter yang terpadu dengan pembelajaran pada mata kuliah; Berbagai hal yang terkait dengan karakter inti, yakni: *jujur, cerdas, tangguh, dan peduli* dirancang dan diimplementasikan dalam pembelajaran kesemua mata kuliah. Hal ini dimulai dengan pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Pembentukan karakter yang terpadu dengan manajemen perguruan tinggi (jurusan/prodi). Berbagai hal yang terkait dengan karakter inti, yakni: *jujur, cerdas, tangguh, dan peduli* dirancang dan diimplementasikan dalam aktivitas manajemen Perguruan Tinggi, seperti: pelayanan akademik, regulasi/ peraturan akademik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, perpustakaan, pembelajaran, penilaian, dan informasi, serta pengelolaan lainnya.
- c. Pembentukan karakter yang terpadu dengan kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan kemahasiswaan yang memuat nilai-nilai karakter inti, yakni *jujur, cerdas, tangguh, dan peduli* dapat dikemas dalam bentuk kegiatan, seperti: olahraga, kegiatan keagamaan (baca tulis Al-Qu'ran, kajian hadist, ibadah, dan lain-lain), seni budaya (menari, menyanyi, melukis, teater), kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan, PMR, pameran, lokakarya, dan lain-lain.

Ketiga, monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan serangkaian kegiatan untuk memantau proses pelaksanaan program pembinaan pendidikan karakter. Fokus kegiatan monitoring adalah kesesuaian proses pelaksanaan program pendidikan karakter berdasarkan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi cenderung untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program

pendidikan karakter berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan proses pelaksanaan program pendidikan karakter. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas program pembinaan pendidikan karakter sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Keempat, tindak lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi dari implementasi program pembinaan pendidikan karakter digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan program, mencakup penyempurnaan rancangan, mekanisme pelaksanaan, dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan manajemen perguruan tinggi yang terkait dengan implementasi program.

G. Wawasan Kebangsaan

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸³

Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia adalah merupakan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif. Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Wawasan Kebangsaan atau

⁸³ Fajar Kurniawan, *Pendidikan Dasar Kewarganegaraan*. (Jakarta: Sri Gunting, 2009), hlm. 52

Wawasan Nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya.

Memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing ditengah-tengah masyarakat yang serba majemuk. Hal ini berarti suasana kondisyang mendorong perkembangan setiap individu sehingga terwujud ketahanan pribadi dapat menciptakan suatu ketahanan nasional Indonesia.

Wawasan Kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasarlaut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.⁸⁴

Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai

⁸⁴ Fajar Kurniawan,... hlm. 160.

dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialami. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.

Banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kekhawatiran itu menjadi semakin nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warganegara, yakni memudarnya wawasan kebangsaan. Apa yang lebih menyedihkan lagi adalah bilamana kita kehilangan wawasan tentang makna hakekat bangsa dan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya dis-orientasi dan perpecahan.

Pandangan di atas sungguh wajar dan tidak mengada-ada. Krisis yang dialami oleh Indonesia ini menjadi sangat multi dimensional yang saling mengait. Krisis ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik, yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, yang tentu akan melahirkan ancaman dis-integrasi bangsa. Apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar. Semua ini mengandung potensi konflik (*latent sosial conflict*) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Dewasa ini, dampak krisis multi-dimensional ini telah memperlihatkan tanda-tanda awal munculnya krisis kepercayaan diri (*self-confidence*) dan rasa hormat diri (*self-esteem*) sebagai bangsa. Krisis kepercayaan sebagai bangsa dapat berupa keraguan terhadap kemampuan diri sebagai bangsa untuk mengatasi persoalan-

persoalan mendasar yang terus-menerus datang, seolah-olah tidak ada habis-habisnya mendera Indonesia. Aspirasi politik untuk merdeka di berbagai daerah, misalnya, adalah salah satu manifestasi wujud krisis kepercayaan diri sebagai satu bangsa, satu *"nation"*.

Apabila krisis politik dan krisis ekonomi sudah sampai pada krisis kepercayaan diri, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (*nation*) sedang dipertaruhkan. Maka, sekarang ini adalah saat yang tepat untuk melakukan re-evaluasi terhadap proses terbentuknya *"nation and character building"* kita selama ini, karena boleh jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal *"kebangsaan"* yang menjadi fondasi ke-Indonesia-an. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan Sukarno, *"menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa."* Bahkan, mungkin yang lebih buruk lagi dari kekuatiran Sukarno, *"menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsa-bangsa"*.

Mengapa akhir-akhir ini wawasan kebangsaan menjadi banyak dipersoalkan. Apabila kita coba mendalaminya, menangkap berbagai ungkapan masyarakat, terutama dari kalangan cendekiawan dan pemuka masyarakat, memang mungkin ada hal yang menjadi keprihatinan. Pertama, ada kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah menjadi dangkal atau tererosi terutama di kalangan generasi muda—seringkali disebut bahwa sifat materialistik mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan. Kedua, ada kekhawatiran ancaman disintegrasi kebangsaan, dengan melihat gejala yang terjadi di berbagai negara, terutama yang amat mencekam adalah perpecahan di Yugoslavia, di bekas Uni Soviet, dan juga di negara-negara lainnya seperti di Afrika, di mana paham kebangsaan merosot menjadi paham kesukuan atau keagamaan. Ketiga, ada keprihatinan tentang adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *penelitian lapangan (field research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu subjek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹ Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu data kategorial berwujud kata, data ini akan ditafsirkan berdasarkan nilai dan bukan ditafsirkan berdasarkan perhitungan angka-angka (kuantitatif).² Dari penafsiran tersebut akan diperoleh kesimpulan yang benar dan obyektif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap proses yang sedang diteliti, berusaha memahami keadaan yang tidak diramalkan sebelumnya dan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut. Sehingga segala sumber data dan dokumen terkait lainnya, dideskripsikan sesuai dengan apa adanya dan kemudian dievaluasi serta dikaji untuk menemukan makna yang telah diperoleh.

¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1., (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 72

²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 148.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif (deskriptif), data diperoleh berupa kategorial bukan data angka-angka, penulis menggunakan pendekatan model paradigma Naturalistik dari Egon G. Guba. Bagi paradigma *naturalistic* Guba, penelitian dilakukan dengan cara interaksi antara peneliti dengan yang diteliti, dan ada pengaruh serta hambatan timbal balik. Karena itu peneliti harus memandang yang diteliti sebagai subyek, mereka beraktivitas, segala sesuatunya *indeterminan*, dan secara bersama peneliti dan yang diteliti serta diobservasi membangun data penelitian.³

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan sosial fenomenologis dan humanisme, karena subyek yang diobservasi bukan hanya subyek diam, melainkan secara aktif mereaksi sebagai subyek, itulah yang dikatakan oleh Guba bahwa manusia itu makhluk yang beraktivitas, aktif mereaksi. Peneliti dengan yang di observasi tidak pilah dikhotomik, melainkan menyatu dan membangun data penelitian. Mungkin peneliti tidak segera memahami makna sesuatu kejadian di lokasi penelitian yang menjadi subyek dasar dari sumber informasi dapat membantu menjelaskan, sehingga pemaknaannya dapat dikatakan disusun bersama antara peneliti dan subyek observasi.⁴

Pendekatan humanis dalam penelitian dipilih karena dianggap sesuai dan dilakukan dengan tujuan ingin melihat secara filosofis dan hierarki melalui pencapaian standar isi kurikulum, sehingga capaian pendidikan tidak hanya pada dataran *kognitif* saja, akan tetapi juga pada dataran *afektif* dan *psikomotorik* peserta didik. Sedangkan metode

³ Noeng Muhadjir, hlm. 148-149

⁴ Noeng Muhadjir, hlm. 158.

interpretasi dalam penelitian ini yaitu untuk memahami makna yang lebih filosofis tentang penerapan kurikulum KKNI dan pendidikan karakter. Ia tidak dibedah untuk mengetahui isinya, tetapi diselami untuk dihayati bersamanya makna-makna yang terkandung di dalamnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta karena perguruan tinggi tersebut telah menerapkan kurikulum KKNI dengan pengaitan dengan wawasan kebangsaan serta moderasi beragama dan ini dianggap sebagai pilot project yang dapat merepresentasikan dan mewakili keseluruhan PTKI di Indonesia.

4. Objek/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan alasan pemilihan Perguruan Tinggi tersebut karena telah menerapkan Kurikulum KKNI dengan pengaitan dengan wawasan kebangsaan serta moderasi beragama ditambah dari sisi keilmuan, perguruan tinggi tersebut memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Yaitu perpaduan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara hierarki dan integrasi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan aplikasi pengumpulan data kualitatif yaitu aplikasi NVivo, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan proses pengumpulan dan analisis data.

Adapun teknik yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi*. *Triangulasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi sumber, data dan evaluator*. Yaitu peneliti mencoba mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama serta mengevaluasi hasil penelitian dengan menggunakan evaluator yang berbeda dengan data yang sama. Melalui teknik *triangulasi* ini, peneliti menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data untuk sumber data yang sama. Proses triangulasi ini dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digabungkan tersebut adalah:

1. Observasi (pengamatan langsung).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis *observasi partisipatif moderat* (sedang), yaitu berusaha menyeimbangkan posisi sebagai orang dalam yang mengamati dari dekat dan sebagai orang luar yang mengamati dari luar.⁶ Peneliti masuk ke dalam latar,

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 241.

⁶ Sugiyono, hlm. 227

bergaul dan berbincang-bincang dengan subyek. Selain itu peneliti juga ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di lapangan, tetapi tidak semuanya.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur yang tetap mengacu pada permasalahan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian informan memperoleh kebebasan dan kesempatan mengeluarkan pikiran, pandangannya dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan subyek yang diteliti dan diarahkan sesuai dengan fokus penelitian.⁷ Peneliti berusaha melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah para personal yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi yang diambil sebagai subjek penelitian, yang meliputi berbagai personal yang terkait dengan kegiatan tersebut, yang meliputi pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini adalah para pimpinan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diambil sebagai subjek dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi/ Menelaah dokumen.

Selain mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, penulis juga mengumpulkan data melalui data dokumen

⁷ Sugiyono, hlm. 227

yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya telah dibukukan oleh staf tata usaha. Data yang akan dijaring melalui telaah dokumen meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Profil perguruan tinggi;
- b. Peraturan-peraturan tertulis yang ada dan digunakan di lingkungan perguruan tinggi;
- c. Data tentang perencanaan, kurikulum, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perguruan tinggi;
- d. Perihal tentang pendidikan karakter pada perguruan tinggi;
- e. Berbagai macam data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)/ Diskusi Kelompok Terfokus

Pengumpulan data dengan teknik ini adalah dengan menggunakan sebuah forum diskusi terfokus untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tema yang menjadi fokus dalam penelitian ini.⁸ Adapun yang menjadi peserta dalam *Focus Group Discussion* (FGD) ini adalah dosen dan mahasiswa-mahasiswa pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi subjek penelitian serta beberapa praktisi pendidikan terkait dengan fokus penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami.

⁸ Warul Walidin, Saifullah Idris & Tabrani. ZA., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015)., hlm. 86

Dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, secara teoritis analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang guna memecahkan masalah. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:¹⁰

- a. Reduksi Data;
- b. Penyajian Data;
- c. Penarikan kesimpulan data/ verifikasi

1. *Reduksi data*

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana diketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

⁹ Sugiyono, hlm. 244

¹⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohindi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

2. *Penyajian Data*

Setelah dilakukan proses reduksi data, analisis data kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam prosesnya penyajian data juga sama dengan reduksi data dengan arti tidak terpisah dari analisis, ia merupakan bagian dari analisis.

3. *Menarik Kesimpulan/ Verifikasi*

Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh peneliti selalu bersifat longgar dan terbuka, sehingga akan mempermudah untuk disempurnakan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data telah dilakukan seluruhnya dengan mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dalam catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan matriks-matriks yang telah dibuat untuk menemukan pola, topik atau tema sesuai dengan penelitian.

D. Anggaran Biaya

Anggaran biaya dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Adapun penelitian ini sepenuhnya di biayai dengan dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan 1 tahun dengan pelaksanaan selama 5-7 bulan pelaksanaan. Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan dan Tahapan Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Bulan ke-I				Bulan ke-II				Bulan ke-III				Bulan ke-IV				Bulan ke-V				Bulan ke-VI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pendahuluan	x	x	x	x	x	x	x	x																
	Memahami masalah yang akan menjadi fokus penelitian	x																							
	Telah Objek (<i>Paper, Person, Place</i>)	x	x		x																				
	Memilih tempat penelitian				x																				
	Melakukan informasi awal di lapangan/ Pre observasi				x	x	x	x	x																
	Mengajukan perijinan kepada pihak yang terkait				x	x	x	x	x																
2.	Literatur Review					x	x	x	x																
3.	Bangun Pernyataan Tesis					x	x	x	x																
4.	Seminar Draft Awal											x													
5.	Pengujian lapangan Kepustakaan/ Studi Kepustakaan												x	x	x										
	Bangun Hipotesis													X	x										
	FGD Draft dan Konsep Awal																x								
6.	Pengumpulan Data																	1	1	2	2				
	Observasi, Wawancara, Telaah Dokumentasi (Titik 1 dan 2)																	1	1	2	2				
7.	Reduksi Data																	1	1	2	2				

No.	Tahapan Penelitian	Bulan ke-VII				Bulan ke-VIII				Bulan ke-IX				Bulan ke-X				Bulan ke-XI				Bulan ke-XII						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
8.	Pengolahan dan Analisis Data																											
9.	Triangulasi Data, Sumber dan Evaluator																											
10.	Penyajian Data																											
11.	Verifikasi Data																											
12.	FGD Draft Hasil Awal																											
13.	Perumusan Temuan																											
14.	Analisa dan Rumusan Pengembangan Paradigma, Kerangka Model Implementasi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, meliputi kurikulum pembelajaran, asesmen pencapaian kompetensi (Review Kurikulum IIM Expert)	x																										
15.	Analisa dan Rumusan Implementasi Kurikulum mengacu KKNI, meliputi uji kompetensi kurikulum dalam pendidikan karakter (Review Kurikulum IIM Expert)		x																									
16.	Analisa dan Rumusan Kebijakan perubahan Kurikulum mengacu KKNI dan Pendidikan Karakter																											

BAB IV

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas dan Mutu Pendidikan di PTKIN

Pendidikan Tinggi Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengalami perubahan panorama selama dekade terakhir. Perubahan panorama yang dimaksud meliputi perubahan paradigma, pengelolaan, persaingan dan sebagainya. Perubahan paradigma terutama dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, termasuk pandemi Covid-19, sehingga *e-learning*, *e-university*, dan sejenisnya mulai banyak dibicarakan dan diusahakan.

Paradigma baru Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, globalisasi, pasar bebas, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya PTKIN melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Jaminan Mutu Pendidikan untuk menjamin agar mutu pendidikan di suatu PTKIN dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai yang direncanakan/dijanjikan.

Perguruan tinggi tidak hanya dilihat sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat penelitian, dan pusat pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga suatu entitas korporat “penghasil ilmu pengetahuan” yang perlu “bersaing” untuk menjamin kelangsungan

hidup. Persaingan, sebagaimana dialami oleh perusahaan profit, meliputi persaingan di bidang mutu, harga, dan layanan. Perguruan tinggi sebagai suatu entitas non profit, menghadapi hal yang sama pula. Pengelolaan semuanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan manajemen, yaitu manajemen perguruan tinggi.

Pendidikan tinggi dan dunia kerja jadi fokus yang penting saat ini. Untuk mewujudkannya, perlu sinergi dengan banyak pihak. Strategi peningkatan lulusan bermutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus ditingkatkan dengan fokus pada subsistem manusia dan teknologi, yang meliputi: (1) mahasiswa yang di didik; (2) dosen sebagai pendidik dan pengajar; dan (3) sarana dan prasarana.¹

Selain itu, sistem pembelajaran yang diterapkan di UIN Sunan Kalijaga khususnya saat ini lebih terfokus pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, serta juga lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. Sehingga peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi sangat diperlukan, termasuk untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada mutu.²

Bagi para pemilik dan pengelola Perguruan Tinggi, sistem manajemen mutu pada hakikatnya berinti pada perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan sehingga dapat diserap oleh kalangan instansi dan pasar tenaga kerja. Krisis ekonomi dan moneter, pasar bebas dan musibah Covid-19

¹ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

² Hasil wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

telah menuntut untuk lebih cermat dalam menentukan wawasan ke depan yang didasarkan atas pertimbangan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang menuntut untuk lebih efektif dan efisien dalam bertindak. Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas dari suatu produk.³

Para mahasiswa sebagai calon penerus masa depan bangsa yang sedang mengenyam pendidikan di PTKI khususnya UIN Sunan Kalijaga, dituntut mendapatkan hasil yang memiliki nilai ganda, yaitu ilmu pengetahuan, gelar, keterampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur yang mampu bersaing di pasar global. Semuanya itu diperlukan sebagai persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan lahir serta batin.⁴

Tuntutan tersebut diberlakukan pada UIN Sunan Kalijaga dan dicantumkan dalam rencana strategis Universitas, dengan tujuan untuk menghindari merosotnya mutu lulusan, mengingat standarisasi mutu lulusan akan menjadi tujuan; karena sekarang ini banyak perguruan tinggi hanya melihat dari aspek kuantitas; yakni bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Hal ini sangat dihindari oleh UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu PTKIN tertua di Indonesia. Apalagi sekarang ini sudah diberlakukannya otonomi kampus, sehingga ada kecenderungan untuk mencari dana yang memadai; namun terkadang mengabaikan

³ Hasil wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

⁴ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

aspek mutu itu sendiri tidak terkecuali juga dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).⁵

Perguruan tinggi sebagai wadah untuk menggodok kader-kader pemimpin bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul orang-orang yang berilmu dan bernalar. Tanggung jawab pendidikan tidak saja beban pemerintah namun oleh seluruh lapisan masyarakat. Masalah penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana manajemen perguruan tinggi diatur dalam suatu manajemen yang rapi, efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah yang jelas yakni mutu lulusan yang baik.

Kemenristekdikti telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung terciptanya lulusan perguruan tinggi yang bermutu dan lebih siap bekerja dan menciptakan pekerjaan. Menghasilkan alumni yang terbukti lebih kompetitif di dunia kerja, dan hasil-hasil karya inovasi mahasiswa melalui PKM potensial untuk ditindaklanjuti secara komersial menjadi sebuah embrio bisnis berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS). Kebijakan dan program penguatan kelembagaan yang mendorong peningkatan aktivitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha-wirausaha baru dengan basis IPTEKS sangat diperlukan.

Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam melihat kekuatan suatu bangsa yang semula bertumpu pada kekuatan sumber daya alam (SDA) kepada kekuatan yang bertumpu pada

⁵ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 dan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022 serta diperkuat dengan Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

sumber daya manusia (SDM). Bangsa yang kuat saat ini, bukan lagi bangsa yang hanya mengandalkan kekayaan alamnya, tapi bangsa yang mampu menguasai informasi dan teknologi (IT) melalui kemajuan di bidang pendidikan. Pergeseran paradigma ini telah direspons oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perhatian pada sektor ini dilakukan dengan asumsi bahwa pendidikan adalah upaya yang paling utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Azyumardi Azra bahwa, dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transmisi menuju demokrasi dan dapat membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan global yang semakin intens.⁶

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka, empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan Indonesia yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan (4) efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan dan kualitas yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*).⁷

⁶ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hlm. 215.

⁷ Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan pembangunan, dan kualitas pendidikan akan dapat lebih mencapai hasil sesuai dengan misi, visi dan fungsinya. Upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan (proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁸

Dalam Dharma Pendidikan, perlu dievaluasi relevansi program dan jurusan yang ada dalam kebutuhan pembangunan, dalam arti apakah sumber daya manusia yang dihasilkan dapat diserap oleh kegiatan perekonomian dan pembangunan. Mengenai penyerapan lulusan perguruan tinggi ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang belum selesai, yang sebenarnya itu adanya perbedaan di dalam melakukan pendekatan. Sedikitnya itu ada dua pendekatan yang berbeda; yakni pendekatan dari dunia kerja dan pendekatan kalangan perguruan tinggi.

Pendekatan pertama, menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak mampu bekerja sebagaimana yang di inginkan dunia kerja, yakni keahlian yang dimiliki masih jauh dari harapan. Pendekatan pertama menginginkan lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan kerja (*skill*) yang memadai dan siap untuk bekerja. Kalangan perguruan tinggi sebenarnya tanggap dan merespons, sehingga disiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti komputerisasi; laboratorium, bengkel kerja dan pusat data.

⁸ Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

Namun pada kenyataannya dalam membentuk keahlian itu tidaklah memadai dan tidak menyebar secara merata di setiap PTKI.⁹

Pendekatan kedua, dari kalangan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, hal ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003.¹⁰

Melalui pendekatan ke dua ini, UIN Sunan Kalijaga membuat tujuan pendidikannya tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk siap kerja, tetapi jauh lebih luas, yakni menyangkut pembentukan peserta didik menjadi manusia seutuhnya dan keterampilan merupakan hal yang penting yang dapat dimiliki oleh seseorang.¹¹ Akan tetapi, perbedaan dua pendekatan yang berbeda ini tetap dikembangkan adanya pemahaman yang mendalam, sehingga tidak saling mengklaim sebenarnya sendiri, minimal dapat ditarik benang merahnya.

Pendidikan sebagai suatu proses, *pertama* mengenal adanya *raw-input* dan *instrumental input*. Raw input merupakan peserta didik sedangkan *instrumental input* terdiri dari: gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, metode dan lain-lain. *Kedua*, *raw input* dan *instrumental input* masuk dalam proses, yang ini akan memakan waktu delapan (8) semester.

⁹ Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 7 Juni 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 7 Juni 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022

Ketiga, output (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk ke dalam persaingan sumber daya manusia. Dosen merupakan instrumen yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosenlah perpindahan ilmu dilakukan kepada peserta didik. PTKI yang memiliki tenaga-tenaga dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu, pada UIN Sunan Kalijaga program untuk meningkatkan kualitas para dosen adalah merupakan kewajiban yang tidak ditawar-tawar lagi dan selalu disediakan dan difasilitasi pada saat ini dan dimasa mendatang.¹²

Perguruan tinggi yang tidak mau mengikuti arus perkembangan zaman, maka di masa yang akan datang perguruan tinggi tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat dan lambat, cepat atau lambat akan mengalami kemunduran, dan pada akhirnya akan mengalami keruntuhan. Salah satu upaya untuk mempertahankan eksistensinya agar senantiasa mengikuti perkembangan zaman, maka UIN Sunan Kalijaga terus berusaha menyesuaikan pola dan system pendidikannya, salah satunya adalah dengan pengembangan kurikulum.¹³ Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kurikulum pada UIN Sunan Kalijaga dibagi dalam kurikulum inti dan kurikulum lokal (institusional). Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara

¹² Hasil Wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

¹³ Hasil Wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik, dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum lokal (institusional) adalah bagian dari kurikulum yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas universitas. Untuk mengembangkan kurikulum, UIN Sunan Kalijaga khususnya dan PTKI secara umum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.¹⁴

B. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan pada PTKIN

Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dalam kancah internasional, Perguruan Tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu untuk memecahkan berbagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan.

Dalam konteks kekinian, maka PTKI harus merespons tantangan yang ada dan menerapkan paradigma baru sesuai kebutuhan masyarakat. Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga menegaskan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022. Pernyataan ini juga sesuai dengan Pasal 38 ayat 3 dan 4 serta UU RI Nomor 20 Tahun 2003.

bahwa dewasa ini, paradigma baru pendidikan tinggi pada dasarnya bertumpu kepada tiga pilar utama, yakni kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu (*quality assurance*). Implementasi dari konsep paradigma baru pendidikan tinggi ini adalah memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan tinggi untuk menjalankan misi akademisnya, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.¹⁵

Namun demikian PTKI dituntut untuk bersifat akuntabel dalam hal nilai akademisnya dan kinerja manajemennya. PTKI juga harus bertanggung jawab terhadap mutu dan programnya serta derajat akademisnya yang diberikan. Agar pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka program studi yang tersedia diarahkan harus sesuai dengan minat masyarakat, selaras dengan tuntutan jaman, calon mahasiswanya haruslah baik, tenaga pengajarnya berbobot, proses pendidikannya harus dapat berjalan dengan baik, serta sarana dan prasarannya harus memadai.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengambil kebijakan di UIN Sunan Kalijaga serta berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan telah dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sehubungan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan di PTKIN antara lain:¹⁷

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

¹⁷ Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 6-10 Juni 2022.

1. Mahasiswa yang di Didik

Untuk dapat menghasilkan produk yang baik, maka harus menanam bibit-bibit yang baik. Untuk mendapatkan bibit yang baik perlu seleksi yang baik pula. Kendalanya yang dihadapi di hampir perguruan tinggi dalam mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai kualitas baik adalah terbentur dengan beberapa faktor misalnya dengan motto Universitas: Biaya Terjangkau Mutu Terjamin, yang harus tetap dilaksanakan. Penerapan seleksi yang mengedepankan mutu dan target penerimaan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya masih menjadi pertimbangan yang belum bisa dilaksanakan.

Satu sisi penting untuk menerima calon mahasiswa yang bermutu, tetapi dari sisi yang lain dihadapkan pada target minimal; yang juga sulit untuk menentukan jumlah minimalnya. Dengan mendapatkan jumlah mahasiswa yang memadai, maka PTKI akan memiliki dukungan dana yang kuat; karenanya cenderung menerima jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya.

Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, maka UIN Sunan Kalijaga khususnya melakukan penjarangan yang betul-betul dapat dijaring dengan seleksi yang ketat supaya calon mahasiswa yang diterima itu mempunyai standar kualitas yang baik karena bagaimanapun Mahasiswa tidak lepas dari tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Di samping itu tingkat kedisiplinan mahasiswa juga ditingkatkan, karena melalui disiplin yang tinggi ini mahasiswa benar-benar dapat mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan ilmu pengetahuan yang diterimanya.

Selain itu, untuk menambah mutu serta kemampuan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi, maka mahasiswa juga dituntut untuk dengan kemampuan berorganisasi, sebab di dalam organisasi ini mahasiswa akan mampu mengembangkan potensi pribadinya dan menambah pengalaman guna menunjang ilmu pengetahuan yang diterimanya.

2. Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar

Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya. UIN Sunan Kalijaga kaitannya dengan kualifikasi ini menetapkan bahwa seorang dosen yang mengajar pada setiap matakuliah minimal telah mendapat penyetaraan jabatan fungsional dari Kemenristekdikti, dengan jabatan Asisten Ahli. Semakin tinggi jabatan fungsional dosen ini menunjukkan tingkat kualifikasi seseorang, baik dari aspek prestasi ataupun prestisenya.

Selain itu UIN Sunan Kalijaga menetapkan aturan yang sangat ketat terhadap dosen yang mengajar, bahwa dosen harus mempunyai disiplin yang tinggi, juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap ilmu yang diberikan kepada mahasiswa. Bagaimana mungkin dapat meningkatkan mutu pendidikan apabila dosen hanya memberikan kuliah 3-4 kali pertemuan dalam setiap semesternya. Dan ini terus dilakukan evaluasi dan monitoring yang dilakukan langsung oleh tim LPM Universitas dengan berkoordinasi dengan PJM Fakultas.

Dosen mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya agar ia tidak hanya memberikan kuliah secara asal-asalan. Tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar mengajar akan timpang dan bisa jadi kurang efektif. Peningkatan kualitas dosen pada UIN Sunan Kalijaga khususnya dimulai dari sistem perekrutan, peningkatan kemampuan dosen, sistem penilaian terhadap kemampuan dan kinerja dosen, serta sistem peningkatan kariernya. Tentu saja upaya peningkatan kualitas dosen ini juga disertai dengan peningkatan kesejahteraannya.

Kemampuan dosen itu meliputi kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dan teknik dalam memberikan pengajaran. UIN Sunan Kalijaga hal ini melakukan peningkatan kemampuan dosen yang dilakukan dan dilaksanakan dari dua aspek, yaitu peningkatan ilmu pengetahuan di bidangnya, dan kemampuan atau keterampilan dalam mengajar; yakni menggunakan metode pembelajaran secara tepat. Di samping itu juga dilihat dari klasifikasi pendidikan (S2/S3) dan jenjang jabatan akademiknya. Pengelolaan mutu dosen pada UIN Sunan Kalijaga dilakukan melalui peningkatan pendidikan ke strata yang lebih tinggi, baik pada PTN maupun PTS terbaik di dalam maupun di luar negeri secara bertahap dan berencana. Masalah mendasar yang biasa dihadapi dosen di dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 menyangkut biaya pendidikan dan relevansi disiplin ilmu. Akan tetapi UIN Sunan Kalijaga dalam hal ini memberikan dukungan kepada para dosen yang sedang atau akan melanjutkan studinya dengan cara memberikan beasiswa dan bantuan kepada para dosen.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta senantiasa lebih peduli dengan peningkatan kualitas dosen ini, dengan memberikan dukungan dana yang memadai di dalam anggaran pendapatan dan belanja Universitas. Di samping itu juga dilakukan melalui meningkatkan kegiatan-kegiatan seminar (lokal, regional dan nasional), simposium, diskusi, serta penataran-penataran dan lokakarya, baik di fakultas dan universitas sendiri, maupun di perguruan tinggi terkemuka di tanah air.¹⁸

Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha dan dunia industri dalam kaitannya dengan program keterkaitan dan kesepadanan sebagai penambah wawasan dan cara berpikir serta keterampilan bagi dosen. Dengan adanya keterkaitan secara sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha/industri; maka ketimpangan mutu lulusan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab bersama; yang sama-sama harus dipikul. pemerintah memberikan fungsi pembinaan dan pengaturan, dunia usaha/industri menyerap lulusan dan perguruan tinggi menyiapkan lulusannya dengan standarisasi mutu guna mengisi dunia kerja.¹⁹

3. Sarana dan Prasarana

Untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka UIN Sunan Kalijaga juga terus melakukan kerjasama sama dengan pihak dunia usaha/industri sebagai penyerap dan pemakai tenaga lulusan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa, alumni

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

dan perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha, untuk memberikan masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu berkiprah di era globalisasi, apalagi kebijakan terbaru dari pemerintah adalah penerapan Kurikulum Merdeka-Kampus Merdeka (MBKM) dengan sistem pemagangan terhadap mahasiswa selama 2 semester.

Untuk itu, maka UIN Sunan Kalijaga terus melakukan perbaikan terhadap kurikulum dengan menambahkan program-program baru seperti: penguasaan bahasa internasional, teknologi komputer, program magang dan etika. Laboratorium sebagai ajang latihan dan praktek mahasiswa juga terus dilengkapi dengan fasilitas yang cukup serta program pelatihannya disesuaikan dengan perkembangan dunia industri dan jasa. Sedangkan perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi juga terus diupayakan dan diperkaya serta dilengkapi dengan berbagai jurnal dan literatur yang terbaru. Sarana komputerisasi dan perangkat yang lengkap memungkinkan mahasiswa dapat melakukan interaksi secara global; termasuk menggali pengetahuan lewat internet. Demikian pula gedung atau ruang perkuliahan serta perlengkapannya sebagai penunjang proses pendidikan dan pengajaran terus diupayakan peningkatannya, karena hal ini perlu mendapat perhatian dari segi kebersihan, keindahan serta kenyamanannya.

C. Membangun PTKIN Berorientasi Mutu

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga di pada bagian sebelumnya bahwa paradigma baru pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang

berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Era Pasar bebas, globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya PTKIN melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Jaminan Mutu Pendidikan untuk menjamin agar mutu pendidikan di suatu PTKIN dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan.

PTKIN di Indonesia diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang fleksibel dan dinamis agar memungkinkan setiap PTKIN untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan tuntutan eksternal yang dihadapinya. Kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu bidang manajemen yang mencakup dimensi proses dan substansi. Pada tataran proses, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum dilakukan dengan prosedur kerja yang ketat. Pada tataran substantif, seperti personalia, keuangan, sarana dan prasarana, instrumen pembelajaran, layanan bantu, layanan perpustakaan, dan sebagainya, tidak hanya substansinya belum komprehensif, melainkan kriteria keberhasilan untuk masing-masingnya belum ditetapkan secara taat asas.²⁰

Kebanyakan PTKIN di Indonesia belum menggunakan sistem Manajemen Mutu dengan baik dan tepat. Setiap PTKIN perlu melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Adapaun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam

²⁰ Sudarwan Danim. *Menjadi Komunitas Pembelajaran*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 6.

hal ini sudah memberlakukan konsep siklus PDCA (*plan-do-check-act*), yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.²¹

Selanjutnya UIN Sunan Kalijaga juga aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan sejauhmana pencapaiannya. Tujuan dan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk meneliti efektivitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Aktivitas tersebut terus menerus dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).²²

1. Mutu sebagai Orientasi Utama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 menjelaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga sebagai suatu satuan pendidikan telah memiliki berbagai pedoman penyelenggaraan dan menjalankan secara konsisten aturan perundangan undangan agar penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar mutu tertentu di mana lulusannya dapat bersaing. Hal ini sesuai sebagaimana yang disampaikan oleh Tilaar bahwa pendidikan yang melahirkan lulusan berkualitas, harus memadukan budaya dan keseluruhan aspek kehidupan.²³

Organisasi pendidikan dipandang oleh berbagai pihak sebagai organisasi bidang bisnis. Organisasi yang bergerak dalam

²¹ Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

²² Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

²³ H.A.R. Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 15

bidang bisnis membutuhkan manusia yang berkualitas.²⁴ Semakin tinggi budaya bisnis suatu masyarakat semakin tinggi pula tuntutan dan kompetisi kualitas manusia. Tuntutan kualitas manusia yang semakin tinggi akan sejalan dengan tuntutan organisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang semakin baik.

Perguruan Tinggi memiliki ciri keunikan dan kekompleksan. Kondisi unik dan kompleks itu terletak pada keanekaragaman sumber-sumber organisasi perguruan tinggi. Jika penyelenggara kegiatan akademik memiliki latar budaya yang beragam, maka kemungkinan kampus akan tercerai-berai secara kultural. Oleh karena itu, diperlukan tingkat koordinasi dan adaptabilitas yang tinggi di antara pimpinan perguruan tinggi.²⁵

Organisasi perguruan tinggi yang baik adalah organisasi perguruan tinggi yang secara kultur terintegrasi. Kultur perguruan tinggi yang terintegrasi ada pada struktur organisasi perguruan tinggi yang birokratis. Hubungan antara pimpinan, dosen, dan karyawan perguruan tinggi biasanya didasarkan atas persamaan kegiatan dan kepentingan.

Dalam kerangka pengembangan perguruan tinggi ke depan, pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti, memberikan perhatian yang serius pada pembinaan organisasi perguruan tinggi. Manajemen PT yang profesional dan akuntabel merupakan hal yang mendesak untuk dibangun. Manajemen PT hendaknya diselenggarakan dengan

²⁴ Jeffrey Pfeffer, *Keunggulan Bersain Melalui Manusia: (Competitive Advantage Through People)*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm. 19

²⁵ J.A. Bartky. (1956). *Administration an Educational Leadership*. California: Stanford University Press. hlm. 12

menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang fleksibel, dinamis serta berorientasi mutu agar memungkinkan setiap perguruan tinggi untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.

2. Sistem Manajemen Mutu (Penerapan *Total Quality Management*)

Perbaikan mutu pendidikan tinggi menjadi semakin penting dengan meningkatnya persaingan dalam era liberalisasi ini. Otonomi yang semakin besar, harus diimbangi oleh peningkatan tanggung jawab. Lembaga pendidikan tinggi harus bisa mendemonstrasikan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu kepada para mahasiswanya. Hal ini hanya akan bisa dicapai bila suatu perguruan tinggi melakukan evaluasi diri secara teratur sebelum dievaluasi oleh pihak ketiga secara eksternal yakni akreditasi. Evaluasi secara teratur dalam bentuk "audit internal" yang dilanjutkan dengan "review sistem manajemen" akan menjamin suatu perguruan tinggi dapat secara kontinyu melakukan perbaikan mutu, dalam mengantisipasi persaingan yang semakin ketat bagi lulusannya dalam meniti karier di dunia kerja.

Dalam rangka melaksanakan perbaikan mutu yang kontinyu (berkelanjutan), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan pendekatan TQM (*Total Quality Management*). TQM merupakan kegiatan pikiran (sikap, gagasan) dan kegiatan praktis (metode, prosedur, teknik) yang mendorong perbaikan kontinyu, dan dianggap sebagai pendekatan yang tepat.²⁶ Sebagai suatu pendekatan, TQM mengupayakan agar penekanan institusi bergeser secara permanent dan "*shorter expediency*" ke perbaikan mutu jangka panjang. Inovasi,

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

perbaikan dan perubahan yang terus menerus perlu ditekankan. Di samping itu unit-unit kerja yang melaksanakannya dilibatkan dalam siklus perbaikan mutu yang kontinyu. Penerapan TQM dalam suatu lembaga pendidikan tinggi memerlukan “perubahan budaya”. Perubahan budaya ini merupakan salah satu faktor penghambat yang cukup sulit dan cukup memakan waktu. Budaya mutu mencakup sikap dan metode kerja staf di samping sistem manajemen dan kepemimpinan.²⁷

Perencanaan strategis merupakan suatu wahana yang cukup baik dalam menanggulangi hambatan budaya tersebut. Proses perencanaan strategis banyak membantu staf dalam memahami misi perguruan tingginya dan menjembatani komunikasi yang terputus. Staf jadi tahu mau ke mana perguruan tingginya menuju dan akan menjadi bagaimana di masa depan. Menurut Crosby (1979) dan Salis (1993), bahwa mutu pendidikan tinggi adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.²⁸

Jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

²⁸ Philip Crosby, *Quality is Free*. (New York: Mc Graw Hill Book Inc., 1979), hlm. 58; Lihat juga dalam Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 1993).

secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan.

Dalam mendefinisikan kualitas, menurut Juran (V. Daniel Hunt dalam Nasution) menyatakan bahwa kualitas adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau kualitas sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.²⁹

Berdasarkan definisi kualitas tersebut, elemen-elemen yang terkait adalah: [1] Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. [2] Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. [3] Kualitas merupakan kondisi yang berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).³⁰

Dalam rangka melaksanakan perbaikan mutu pendidikan tinggi Indonesia, TQM mungkin dan harus diterapkan di setiap PTKI sebagai salah satu pendekatan membangun budaya mutu. Negara di Eropa, Amerika serta sebagian negara di Asia telah berhasil menerapkan dengan baik *Total Quality Management* (TQM) dalam bidang pendidikan tinggi. Contoh, di Inggris, sejak berlakunya "*Education Reform Act*" pada tahun 1988, perhatian terhadap mutu pendidikan terus meningkat sampai sekarang. Undang-undang ini banyak menitikberatkan pada monitoring "*performance indicators*"

²⁹ M.N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 15

³⁰ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. *Total Quality Management*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 3.

(indikator kinerja) dari proses pendidikan, yaitu untuk mengukur efisiensi mutu pembelajaran atau efektivitas institusi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.³¹

UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu PTKIN memperoleh lebih banyak apa yang ada di balik indikator kinerja tersebut, karena suatu institusi harus mulai lebih serius pada TQM dengan artian perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap standar pelanggannya seiring meningkatnya persyaratan mutu pelanggan.³²

UIN Sunan Kalijaga dalam penerapan TQM, menyusun sistem mutu dalam bentuk pedoman mutu (*Quality Manual*) yang tertulis sebagai acuan bagi semua orang yang terlibat dalam pencapaian standar-standar kinerja mutu yang ditetapkan. Implementasi sistem manajemen mutu ini diaudit secara berkala dalam rangka memperoleh masukan untuk manajemen review untuk penyempurnaan sistem itu sendiri.³³

Adanya sistem manajemen mutu dalam suatu institusi perguruan tinggi, menjamin terlaksananya perbaikan mutu secara berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam pelbagai aspek jaminan mutu. SPMA dikembangkan dan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pengidentifikasian berbagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran sampai dengan kegiatan yang merupakan proses kunci dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) yang diterapkan dalam pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan tinggi.

³¹ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana..., hlm. 7.

³² Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

³³ Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

Program kerja TQM pada UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu PTKIN di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Merancang sistem manajemen mutu, dalam bentuk pedoman mutu (*quality manual*) secara tertulis sebagai acuan bagi civitas akademika yang terlibat dalam pencapaian standar-standar kinerja mutu yang ditetapkan.
- b. Membuat Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk mendesain, mendiagnosa sistem manajemen mutu sebelum dilembagakan dalam struktur organisasi.
- c. Menyusun serta menetapkan kebijakan dan tujuan mutu di tingkat program studi, serta mengusulkannya di tingkat fakultas dan universitas. Kemudian menyusun indikator kinerja mutu dan sasaran kinerja mutu.
- d. Mulai melaksanakan proyek-proyek perbaikan mutu di Fakultas/Program Studi, antara lain: Penyusunan Buku Pedoman Akademik untuk Mahasiswa; Buku Kurikulum dengan seluruh derivasinya seperti: Satuan Acara Perkuliahan, Analisis Instruksional, Modul Plan, Course Outline, Bahan Ajar Program Studi, pengelolaan manajemen sumber daya manusia, sumber daya sarana fisik/fasilitas dan sarana komunikasi dan informasi teknologi, keuangan, evaluasi akademik untuk mahasiswa dan staf pengajar, proses belajar mengajar, proses tugas akhir, proses ujian akhir semester dan ujian sarjana dan sebagainya.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Wakil Rektor 1, Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022 dan diperkuat dengan hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

- e. Menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen mutu di Fakultas/Program Studi, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja mutu dengan indikator yang telah ditetapkan.

Selain itu, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka UIN Sunan Kalijaga melalui LPM membuat standar yang diatur dan disepakati untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya *benchmarking*/ titik acuan standar/ patokan). Hal ini dilakukan karena kebanyakan PTKIN di Indonesia belum menggunakan Sistem Manajemen Mutu.³⁵ Sistem manajemen mutu yang tepat perlu di kembangkan. Dalam manajemen mutu yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga ini sudah ada tiga sistem yang berkembang, yaitu: 1) Pengawasan Mutu (PM); 2) Jaminan Mutu (JM); dan 3) Manajemen Mutu Terpadu (MMT).

Sistem Mutu dalam bidang pendidikan pada UIN Sunan Kalijaga, memuat unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Rencana Strategis

Rencana strategis memberi visi, misi dan tujuan UIN Sunan Kalijaga dalam jangka panjang serta memberikan arahan terhadap pelaksanaan seluruh program operasional yang disusun tahun demi tahun. Rencana strategis mengidentifikasi sasaran pasar, positioning

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Wakil Rektor 1, Ketua dan Sekretaris LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022 dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa pimpinan Fakultas Tanggal 7 Juni 2022 serta hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

dan budaya yang diinginkan dalam memproduksi produk (lulusan) untuk memenuhi pasar tersebut. Rencana strategis sangat penting untuk pencapaian mutu pelayanan sebab hanya perencanaan yang dapat memberikan perspektif keadaan persaingan di masa mendatang.

2. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu merupakan acuan umum bagi program-program utama yang semestinya disusun untuk mengantisipasi kebutuhan dan persyaratan mutu masyarakat. Kebijakan merupakan persyaratan kepada masyarakat tentang komitmen UIN Sunan Kalijaga sebagai PTKIN untuk memuaskan harapan pelanggan baik internal maupun eksternal. Kebijakan mutu ini terdokumentasi, dikomunikasikan kepada seluruh staf (akademik dan non akademik) agar dipahami dan selanjutnya memberikan komitmen pada implementasinya.

3. Tanggung Jawab Manajemen

Unsur ini meletakkan peranan dan tanggung jawab manajemen puncak, manajemen madya dalam sistem mutu. Ditetapkan juga anggota tim senior yang memimpin pelaksanaan program perbaikan mutu pada UIN Sunan Kalijaga.

4. Organisasi Mutu

Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab kelompok pengarah untuk mengimplementasikan sistem mutu pada UIN Sunan Kalijaga ditetapkan kelompok atau tim, yang berfungsi: mengarahkan langkah awal perbaikan mutu, mengelola perubahan

budaya mutu, mendukung dan mengendalikan kegiatan-kegiatan unit kerja dalam langkah awal tersebut, dan memonitor perkembangan program perbaikan mutu. Fungsi tim dalam melaksanakan program dan pemecahan masalah merupakan titik berat dari langkah awal perbaikan mutu. Dukungan, kepemimpinan dan sumber daya serta adanya pelatihan tim diperlukan untuk menyukseskan gerakan awal ini.

5. Pemasaran dan Publikasi

UIN Sunan Kalijaga memberikan informasi yang jelas mengenai program-program studi yang ditawarkan secara lengkap. Informasi ini didokumentasikan dengan baik dan mudah diperoleh. Bahan-bahan pemasaran (*sales kits*) seperti selebaran, leaflet, brosur, iklan dan sebagainya dibuat dengan jelas dan tepat serta secara teratur diperbaharui.

6. Seleksi Masuk

Seleksi masuk merupakan tahapan sangat penting dalam proses pendidikan. Meskipun tidak ada data pendukung, tetapi pengaruh mutu bahan mentah (calon mahasiswa) terhadap mutu lulusan sangat besar.

Prosedur seleksi masuk ke perguruan tinggi didokumentasikan dengan baik dan di review secara teratur. Hal-hal yang perlu didokumentasikan mencakup pedoman seleksi, surat lamaran asli (termasuk lampirannya), hasil wawancara, daftar nama.

7. Rancangan Kurikulum

Rancangan kurikulum mencakup maksud dan tujuan setiap program studi dan spesifikasinya secara rinci, terdokumentasikan. Studi

prosedur pembukaan/ program penetapan juga didokumentasikan. Spesifikasi meliputi silabus dan satuan acara perkuliahan/praktikum disahkan oleh pejabat tertentu, dalam hal ini adalah ketua prodi dan coordinator matakuliah. Adanya masukan dari mahasiswa, alumni dan "client" bagi rancangan kurikulum merupakan bagian sistem mutu yang didokumentasikan dengan baik. Tinjauan secara periodik dalam rangka meningkatkan relevansi dengan dunia kerja juga diatur secara berkala.

8. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga merupakan tahapan penting dalam proses pendidikan. Metode pengajaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dimantapkan dan dijelaskan dalam prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan setiap aspek program studi. Berbagai catatan dalam kaitan ini terus dipelihara dan didokumentasikan dengan baik, antara lain, jadwal kuliah/praktikum, "course submissions", kerangka kerja, catatan kerja, catatan penilaian, rencana kerja dan catatan-catatan prestasi kerja. Demikian pula catatan-catatan kegagalan dan kinerja di bawah standar dan tindakan koreksi yang diambil juga didokumentasikan dengan baik.

Sistem yang dikembangkan untuk membantu memecahkan masalah-masalah pembelajaran juga didokumentasikan. Rincian penilaian formatif dan sumatif serta kriteria untuk kelulusan dan "grading" mahasiswa merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan kurikulum.

9. Manajemen Pembelajaran

Proses yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan program dan kurikulum pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di spesifikasi

dengan baik, termasuk pengaturan untuk kerja tim. Peranan dalam tim, wewenang dan tanggung jawab perlu dijelaskan dengan baik dan dicantumkan dalam SOP pelaksanaan.

10. Penyusunan, Pelatihan dan Pengembangan Staf

Staf pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diatur dan ditempatkan sesuai dengan tugasnya. Dalam hal ini dibuat prosedur seleksi dan rekrutmen staf, pengukuran prestasi kerja, peningkatan inovasi dan kebijakan pengembangan karir. Pengembangan staf pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diatur dan dibuat perencanaan dan proses analisis kebutuhan serta sistem monitoring dan evaluasi efektivitas program pelatihan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu juga dilakukan standarisasi bagi kualifikasi staf untuk setiap program studi.

11. Monitoring dan Evaluasi

Siklus umpan balik sangat vital peranannya untuk menilai dan menjamin mutu pendidikan. Sistem mutu dalam kaitan ini mendokumentasikan mekanisme evaluasi yang digunakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memonitor hasil yang dicapai individu-individu dan keberhasilan program yang dilaksanakannya. UIN Sunan Kalijaga juga mengikutsertakan mahasiswa dalam penilaian kemajuannya sendiri, dan pengalaman mereka mengikuti program merupakan unsur penting dalam proses penilaian. Metode yang digunakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari analisis dari catatan pencapaian hasil, review meeting, penyebaran kuesioner dan internal audit.

12. Pengaturan Administrasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendokumentasikan prosedur-prosedur administrasi yang penting meliputi daftar mahasiswa, catatan-catatan mahasiswa, jadwal, prosedur kesehatan dan keamanan, "examination entries and result" dan sistem keuangan. Proses pengendalian dokumen penting, namun tetap dilakukan spesifikasi terhadap dokumen-dokumen kunci agar tidak terlalu menitik beratkan kepada catatan. Dokumen kunci meliputi silabus terbaru, dokumen persetujuan dan pengesahan, catatan kemahasiswaan, catatan penilaian dan hasil ujian, catatan notulen rapat penting dan sebagainya.

13. Review Manajemen Institusi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai suatu cara untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja (*total performance*). Kegiatan ini dilakukan oleh pemeriksa dari luar. Namun demikian, terkadang juga diputuskan bahwa perguruan tinggi melakukan audit sendiri dengan melibatkan pihak luar.

D. Kerangka Model Pendidikan Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan pada PTKIN

Pendidikan karakter di Indonesia sudah di mulai sejak tokoh-tokoh yang dikenal di Indonesia, di antaranya: R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Tan Malaka, Muh. Natsir, dan lain-lain. Mereka mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa sesuai dengan konteks dan situasi yang mereka alami. Walaupun beberapa opini banyak menentang pendidikan karakter "ala Indonesia" yang cenderung maniru atau mengadopsi dari karakter tokoh-tokoh perjuangan bangsa

Indonesia, yang *nota bene* waktu itu yang mereka alami dan mereka hadapi merupakan perjuangan melawan penjajah, sebaliknya pada zaman ini manusia dihadapkan dengan perjuangan melawan jati diri dan prinsip hidupnya sendiri-sendiri, antara pilihan hidup, hitam dan putih, baik dan buruk, jelek dan baik, sehat dan tidak sehat, dan lain-lain.

Pendidikan karakter semestinya mempunyai tujuan jangka panjang yang didasarkan pada tantangan aktif kontekstual individu atas *impuls natural social* yang diterimanya. Berdasarkan tujuan jangka panjang, individu dapat semakin memahami visi hidup yang akan dicapai lewat proses pembentukan diri terus- menerus. Tujuan jangka panjang tidak sekadar berupa idealisme penentuan sarana untuk mencapai tujuan, tetapi sebuah cara pandang dialektis yang semakin mendekatkan antara yang ideal dan kenyataan melalui proses refleksi dan intreraksi terus- menerus antara idealisme, pilihan sarana, dan hasil langsung yang dapat dievaluasi secara objektif.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan karakter berwawasan kebangsaan pada PTKI khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada empat, yaitu 1) berkelanjutan; 2) melalui semua mata kuliah, pengembangan diri, dan budaya kampus; 3) nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan; dan 4) proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.³⁷ Adapun strategi dalam pendidikan karakter pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada lima, yaitu 1) keteladanan, 2) penanaman

³⁷ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

kedisiplinan, 3) pembiasaan, 4) menciptakan suasana yang kondusif, dan 5) integrasi dan internalisasi.³⁸

Diawali dengan pengenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka dosen menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan tanpa dosen mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, tapi dosen merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, Perguruan Tinggi, dan tugas-tugas di luar Perguruan Tinggi.³⁹

Sedangkan strategi dalam menerapkan pendidikan karakter dalam ruang perkuliahan pada PTKI dan khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup lima langkah, yaitu 1) menciptakan iklim yang mendukung terciptanya perilaku moral dan prestasi tinggi, 2) membina keterampilan etis, 3) gunakan pendekatan magang untuk melatih mahasiswa dalam mempraktekkan nilai, 4) pemeliharaan swa-regulasi keterampilan, dan 5) struktur dukungan dalam membangun karakter dengan masyarakat.⁴⁰

³⁸ Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

³⁹ Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

⁴⁰ Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wakil Rektor 1 dan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 8 Juni 2022.

Pendidikan karakter memberikan tiga matra penting dalam setiap tindakan edukatif dan campur tangan intensional bagi sebuah kemajuan pendidikan. Ketiga matra pendidikan karakter itu adalah individu, sosial, dan moral.⁴¹ Adanya hubungan yang negatif antara masyarakat dan individu. Secara kodrat manusia itu baik, namun masyarakatlah yang membelenggu individu sehingga tumbuh semakin menjauh dari kodratnya. Agar manusia tumbuh sesuai kodratnya, pendidikan mestinya melepaskan belenggu sosial dan membiarkan alam berkembang menjadi guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan karakter pada UIN Sunan Kalijaga ada enam, yaitu dosen, bahan ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, kepemimpinan pimpinan Perguruan Tinggi, dan kultur Perguruan Tinggi. Kualitas proses pembelajaran di Perguruan Tinggi sangat bergantung oleh kualitas dosennya. Bahan ajar memegang peran yang penting terhadap informasi yang diperoleh pembaca. Media mempunyai peran yang penting dalam pembelajaran yang tidak dapat tidak pasti ada. Metode pembelajaran yang digunakan dosen akan berpengaruh terhadap suasana komunikasi dalam pembelajaran yang merupakan tingkat penerapan teori-teori yang ada pada tingkat pendekatan. Sebagai atasan langsung dosen, kepemimpinan pimpinan Perguruan Tinggi akan mempengaruhi suasana kerja dosen. Kultur Perguruan Tinggi mempunyai peran yang penting dalam pembangunan karakter.⁴²

⁴¹ Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: Grasindo, 2007). hlm. 143.

⁴² Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan 18 nilai-nilai yang dapat digunakan dalam pendidikan budaya dan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.⁴³ Sedangkan butir-butir karakter ada enam puluh Sembilan, meliputi adil, amanah, pengampunan, antisipatif, arif, baik sangka, kebajikan, keberanian, bijaksana, cekatan, cerdas, cerdik, cermat, pendaya guna, demokratis, dermawan, dinamis, disiplin, efisien, empan papan, empati, fair play, gigih, gotong-royong, hemat, hormat, kehormatan, ikhlas, inisiatif, inovatif, kejujuran, pengendalian diri, kooperatif, kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, kemurahan hati, pakewuh, peduli, penuh perhatian, produktif, rajin, ramah, sabar, saleh, santun, setia, sopan, susila, ketaatan, tabah, tangguh, tanggap, tanggung jawab, bertaqwa, tegar, tegas, tekad (komitmen), tekun, tertib, ketertiban, tahu berterima kasih, trengginas, ketulusan, tepat waktu, toleransi, ulet, berwawasan jauh ke depan.⁴⁴

Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan karakter pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didasarkan pada beberapa indikator. Sebagai contoh, indikator untuk nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan” maka dosen mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang dikatakan seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan

⁴³ Kemendiknas, Kebijakan Pendidikan Karakter Bangsa, (Jakarta: Kemendiknas, 2010), hlm. 23.

⁴⁴ Kemendiknas,... hlm. 79-89.

dirinya. Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat dosen berada di ruang perkuliahan atau di lingkungan kampus.⁴⁵

Model *anecdotal record* (catatan yang dibuat dosen ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu digunakan dosen. Selain itu, dosen dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Sebagai contoh, peserta didik diminta menyatakan sikapnya terhadap upaya menolong pemalas, memberikan bantuan terhadap orang kikir, atau hal-hal lain yang bersifat bukan kontroversial sampai kepada hal yang dapat mengundang konflik pada dirinya.⁴⁶

Pembangunan karakter melalui Pendidikan dijadikan salah satu solusi terbaik agar tantangan masa depan dapat terjawab, sehingga kebijakan implementasi pendidikan yang berbasis karakter dijadikan sebagai kekuatan bangsa. Pendidikan formal melalui Perguruan Tinggi dijadikan dasar pijakan sebagaimana keselarasan dalam fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yaitu “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.⁴⁷

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022, serta hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

⁴⁷ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan masih dipandang sebagai cara untuk membuat manusia menjadi lebih baik, bijak, dan pendidikan menghasilkan manusia-manusia yang mendukung berjalanya masyarakat yang ideal. Namun, tampaknya tetap ada sebagian orang yang merasa tak puas terhadap dunia pendidikan, baik akses, proses, maupun hasilnya. Bahkan pandangan itu memunculkan pandangan pesimis terhadap Perguruan Tinggi, Ivan Illich, misalnya, adalah pemikir humanis radikal yang dalam bukunya *Deschooling Society* (Masyarakat Tanpa Sekolah) menolak Perguruan Tinggi formal yang menurutnya memasung kebebasan dan perkembangan manusia. Perguruan Tinggi dianggapnya sama sekali tak memadai bagi perkembangan anak-anak dan kaum muda, mereka sering mengejek keberadaan Perguruan Tinggi, yang dianggapnya ingin jadi satu-satunya malaikat yang ingin membentuk generasi bangsa dan ingin menyelamatkan anak-anak muda dari ancaman dari kejahatan-kejahatan moral.

Pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan. Kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan harus dihindari karena akan melahirkan situasi lingkungan yang menghambat proses pembelajaran. Akan tetapi, hal itu ternyata masih sering terjadi di dunia pendidikan kita. Dampak kekerasan sangat luar biasa baik kita sadari atau tidak. Lingkungan yang keras, dengan tindakan orang lain yang terlalu kasar, adalah bentuk rangsangan dari luar diri yang membuat kita kaget, tidak mampu merespons secara pelan dan memunculkan pemahaman. Misalnya, ketika ada perkataan kasar dan menyakiti pun sekaligus serangan kekerasan pada kita, kita tak sempat berpikir untuk

menjelaskannya, tetapi meresponnya secara cepat. Itulah yang membuat kita yakin bahwa kekerasan itu dalam banyak hal menghambat pertumbuhan mental secara sehat.

Ada beberapa bentuk kekerasan yang dapat kita pahami dan sekaligus dipetakan ketika berbicara tentang kekerasan di dunia pendidikan. Pertama, kekerasan antara peserta didik. Hal ini bisa terjadi di dalam lembaga pendidikan yang sama. Misalnya kasus kekerasan yang sering dikenal dengan istilah bullying. Ada juga kekerasan yang terjadi antar peserta didik yang berbeda Perguruan Tinggi atau kampus, misalnya tawuran mahasiswa antar Perguruan Tinggi dan kampus yang sering terjadi.⁴⁸

Kasus School Bullying merupakan bentuk kekerasan yang sering mendapatkan perhatian dari para pengamat. School Bullying didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/ sekelompok mahasiswa yang memiliki kekuasaan, terhadap mahasiswa yang lebih lemah. Dengan tujuan menyakiti orang tersebut, Fatchul Mu'in kemudian mengelompokkan perilaku bullying ke dalam lima kategori berikut:⁴⁹

1. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk meremas dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain)
2. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name

⁴⁸ Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

⁴⁹ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Ar- Ruz Media: Yogyakarta, 2011), hlm. 54.

calling), sarkasme, merendahkan (put down), mencela/ mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip).

3. Perilaku non verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam: biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).
4. Perilaku non verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).
5. Pelecehan seksual (Kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

Kedua Kekerasan dalam bentuk perpeloncoan yang biasanya terjadi karena hubungan senioritas-junioritas. Hal ini biasanya dilakukan oleh para mahasiswa dalam masa orientasi bagi mahasiswa yang baru masuk. Bentuk perpeloncoan semacam ini awalnya dipandang sebagai latihan kepemimpinan dan latihan mental yang dianggap sebagai hak para senior untuk memperlakukan juniornya. Akan tetapi, model- model semacam ini belakangan banyak dikritik karena seiring menimbulkan efek yang membahayakan, misalnya ada yang meninggal dunia karena perpeloncoan dengan cara kekerasan fisik yang keterlaluan.⁵⁰

Kegiatan ini juga dipandang hanya menonjolkan tindakan balas dendam para senior yang dulunya juga pernah diperlakukan yang sama saat mereka masih junior juga. Meskipun banyak kritik muncul, tradisi perpeloncoan semacam ini belum sepenuhnya hilang dari lembaga

⁵⁰ Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

pendidikan. Ketiga, Kekerasan pendidik terhadap peserta didik. Kekerasan dalam hal ini dapat kita bagi menjadi: (a). kekerasan fisik dan (b) kekerasan non-fisik atau kekerasan psikologis.

Namun, ada kekerasan psikologis yang umumnya bisa kita lihat dari tindakan dan perkataan para dosen, misalnya bagaimana mereka membuat mahasiswa tidak mampu menerima pelajaran yang baik, bahkan juga tindakan-tindakan atau kata-kata yang mengancam dan mendegradasikan kejiwaan mahasiswa. Dosen maupun orang tua sering memiliki sejumlah ambisi pribadi yang dibebankan di pundak anak. Mereka selalu berdalih demi masa depan anak. Mereka menganggap anak sebagai benda mati yang masa depannya harus ditentukan dosen dan orang tua.

Pendidikan senantiasa diletakkan dalam kerangka dan tugas yang ditujukan bagi sebuah generasi yang sedang ada dalam masa-masa pertumbuhan. Oleh karena itu, pendidikan mengarahkan dirinya pada pembentukan kepribadian individu. Proses pembentukan diri terus menerus ini terjadi dalam kerangka ruang dan waktu. Dengan demikian pendidikan mengacu pada setiap bentuk pengembangan diri yang bersifat persuasi, terus menerus, tertata rapi, dan terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah untuk membentuk kepribadian secara personal dan sosial. Pendidikan juga merupakan fenomena antropologis yang usianya hampir setara dengan sejarah manusia itu sendiri.

Pendidikan adalah proses penyempurnaan diri manusia secara terus menerus, hal ini terjadi karena secara kodrat manusia memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun intervensi manusia terhadap pendidikan sebagai bagian dari usaha melengkapi kekurangan

dari sebuah kondisi yang membutuhkan suatu perbaikan. Lebih jauh lagi kini antar anak bangsa saja sudah saling curiga mencurigai, misalnya dengan yang berbeda etnis, agama, dan kelas sosial.

Sekarang ini baik pada PTKIN maupun perguruan tinggi secara umum wajib memasukkan matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulumnya. Ini dikembangkan untuk mendukung kehidupan demokrasi yang konstitusional.⁵¹ Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa: "Kurikulum Pendidikan wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa". Tiga mata pelajaran tersebut mensyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius, bangsa yang menghargai warga negaranya, dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 menjelaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia. Sehingga pada ketentuan kedua pasal tersebut menempatkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah yang sangat penting dan strategis selain Pendidikan Agama dan Bahasa.

Sejalan dengan perkembangan perubahan Kurikulum, maka dengan diberlakukannya Kurikulum KKNI, menjadi semangat baru bagi eksistensi Pendidikan Pancasila. Perubahan tersebut juga menjawab salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu disadari oleh

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

seluruh pemangku kepentingan (stake-holder) termasuk seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perhatian yang cukup signifikan untuk memulai kembali membangun karakter bangsa.

E. Pengembangan dan Penerapan Kurikulum KKNi Berbasis Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada PTKIN Indonesia

KKNi merupakan kerangka acuan yang dijadikan ukuran dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KKNi juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menurut Perpres No. 08 tahun 2012, KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KKNi merupakan program studi yang mengharuskan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi memperjelas profil lulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh setiap Perguruan Tinggi haruslah berangsur diubah. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan inovasi terhadap suatu tuntutan tersebut. Respons terhadap perubahan kurikulum ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan

Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 08 tahun 2012 dan Pemdikbud No. 73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI, UU PT No. 12 tahun 2012 pasal 29 tentang Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI, Permenristek dan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria seperti:

1. Dalam aspek Attitude
2. Bidang kemampuan kerja
3. Pengetahuan
4. Managerial dan Tanggung Jawab

Dengan adanya target pencapaian ini, Perguruan Tinggi harus mampu menjabarkan sebuah capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan. Menurut Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri khususnya UIN Sunan Kalijaga akan menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus menjamin kualitas lulusan”.⁵²

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa “KKNI akan memudahkan mahasiswa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebab para lulusan dapat disamakan dengan lulusan dari

⁵² Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

Universitas di ASEAN. Oleh karena itu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengumpulkan para ketua program studi dan dekan untuk membuat standar kompetensi kelulusan dan capaian pembelajaran”.⁵³

Wakil dekan Bidang Akademik pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta⁵⁴ mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), ada beberapa hal yang patut dipenuhi sebagai berikut:

1. Learning Outcomes
2. Jumlah sks
3. Mata kuliah wajib
4. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
5. Akuntabilitas Asesmen
6. Waktu studi minimum
7. Perlunya Diploma Supplement

Penerapan kurikulum KKNi berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan di PTKIN sangatlah dibutuhkan karena dapat mengasah potensi mahasiswa untuk menjadi agen yang berwawasan luas dan memiliki skill yang memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masyarakat. Selain itu, sistem KKNi ini lebih memudahkan pihak Perguruan Tinggi untuk menentukan tujuan akhir sebagai hasil capaian pembelajaran yang selama ini diajarkan. Dengan demikian, adanya penerapan KKNi ini menjadikan mahasiswa lebih banyak berkontribusi dalam berbagai hal.

⁵³ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 7 Juni 2022.

Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkapkan bahwa Penerapan kurikulum berbasis KKNI ini bukanlah hanya secarik kertas yang bisa dengan mudah dihapus dan disusun ulang mengikuti format terbaru. Tetapi ia merupakan seperangkat alat pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mengolah masukan menjadi luaran yang memiliki nilai lebih, sehingga ada konsekuensi di dalam pemberlakuannya. Apakah kita semua bisa menjawab bahwa dengan pemberlakuan kurikulum baru maka akan meningkatkan daya serap lulusan oleh lapangan pekerjaan? Ataupun, dapat menaikkan Indeks Prestasi Kumulatif lulusan mahasiswanya? Ataupun, dapat memetakan posisi perguruan tinggi kita dengan rumpun ilmu sejenis? Tentu semua pertanyaan tersebut akan sulit kita jawab, karena tidak ada patokan resmi untuk mengukurnya secara numeris. Yang ada hanyalah patokan normatif yang tertera pada butir penilaian borang akreditasi perguruan tinggi. Tidak semua Perguruan Tinggi berhasil menerapkan kurikulum ini, dan kemudian menjadikannya sebagai acuan keberhasilan yang akan dicapai sebagai profil lulusan.⁵⁵

Berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Wakil Dekan 1 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa akibat pergantian kurikulum pendidikan yang terus menerus dapat mengakibatkan kebingungan bagi mahasiswa. Karena dengan ketidakkonsistennya sistem akademik ini, lebih menyusahkan mahasiswa dalam belajar karena ketidakjelasan kurikulum yang ada.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 7 Juni 2022.

Pengembangan skill pada setiap mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, tidak hanya melalui pendidikan yang berbasis KKNI untuk menciptakan lulusan-lulusan aktif dan dapat berkontribusi di masyarakat. Kebebasan berpikir ini sebenarnya membantu mahasiswa untuk menentukan berbagai perihal terkait problematika yang ada. Terlebih terkait masalah calon-calon kontributor yang sesuai kriteria masyarakat.

F. Sinergisitas Pendidikan Berbasis Karakter dan Berwawasan Kebangsaan dalam Kurikulum KKNI pada PTKIN

Pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai menjadi upaya eksplisit mengajarkan nilai-nilai untuk membantu peserta didik mengembangkan disposisi-disposisi guna bertindak dengan cara-cara yang pasti. Persoalan baik dan buruk, kebajikan-kebajikan dan keutamaan-keutamaan menjadi aspek penting dalam pendidikan karakter. Tanggungjawab untuk melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pengelola pendidikan tinggi.

Akan tetapi, tanggungjawab terhadap penanaman nilai-nilai karakter kepada setiap peserta didik harus dipandang sebagai upaya yang komprehensif dan berkesinambungan dalam proses pendidikan mulai dari sekolah tingkat dasar maupun menengah dan bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Tidak terlepas pula keluarga sebagai unit paling bersentuhan dengan peserta didik memiliki tanggungjawab guna menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter.

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab dalam mempersiapkan lulusannya untuk dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Khusus

bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tentunya menginginkan lulusan yang dapat menyuarkan keadilan dan kebenaran bagi tegaknya aqidah Islam di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut PTKI berkewajiban untuk membekali lulusannya dengan pendidikan moral dan karakter yang baik selain membekalinya juga dengan pengetahuan keagamaan lainnya.

Cara efektif dan efisien dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter berbasis wawasan kebangsaan salah satunya adalah melalui media pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik, masyarakat, bangsa dan Negara harus dilakukan secara sistematis. Output akhir dari usaha tersebut adalah melahirkan manusia Indonesia yang seutuhnya serta memiliki karakter ke-Indonesia-an.⁵⁷

Optimalisasi terhadap pembentukan karakter dan berwawasan kebangsaan pada UIN Sunan Kalijaga seperti di atas diselaraskan dengan kurikulum yang diterapkan pada perguruan tinggi yaitu kurikulum yang mengacu kepada KKNI. Terhadap pengembangan dalam dunia pendidikan, tentunya sebagai kesadaran guna mengimplementasikan nilai-nilai karakter berbasis wawasan kebangsaan dalam kehidupan PTKIN dilakukan melalui proses belajar mengajar yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik baik dalam suasana formal maupun informal.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 6-10 Juni 2022.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 dan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022 serta diperkuat dengan Hasil FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan bahwa PTKIN melakukan penerapan pendidikan karakter berwawasan kebangsaan dalam kurikulum yang mengacu kepada KKNI pada PTKIN tentunya di dalam perumusan capaian pembelajaran yang hendak dicapai oleh kurikulum yang disusun terhadap mutu lulusan. Jika menginginkan lulusan yang memiliki karakter, kepribadian, kejujuran serta yang lainnya pasca peserta didik menamatkan studinya tentunya rumusan terhadap capaian pembelajaran mengarahkan kepada hal tersebut sehingga pada penyusunan rencana pembelajaran semester diharapkan dapat disesuaikan tujuan pembelajaran dengan materi yang akan disampaikan pada proses belajar mengajar.⁵⁹

Senada dengan hal di atas, dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga juga menjelaskan bahwa pada metode pembelajaran yang akan digunakan tentunya dipilih alternatif metode pembelajaran yang dapat dengan mudah untuk mentransfer nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Metode pendekatan yang lebih kepada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dunia global saat ini.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa para Dekan pada PTKIN Indonesia disimpulkan bahwa PTKIN di Indonesia juga melakukan Pendekatan Pembelajaran yang Berpusat pada Mahasiswa (*Student-Centered Learning*) sebagai orang dewasa tentu lebih menekankan kepada metode pembelajaran orang dewasa (*andragogy*), yaitu metode pembelajaran orang dewasa untuk mencapai pengetahuan dan keahlian. Fokus pendekatan ini tentunya

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 8 Juni 2022.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 7 Juni 2022.

bukan semata-mata kegiatan belajar mengajar yang bersumber dari tenaga pendidik melainkan juga keaktifan dan partisipasi yang berasal dari peserta didik yang disejalankan dengan kondisi sosial yang lebih kontekstual.

Metode *andragogy* yang kontekstual ini diharapkan mampu untuk menyisipkan nilai-nilai pendidikan karakter di dalam pengalaman empiris sehari-hari peserta didik serta kondisi terkini yang sedang terjadi di lingkungan sosial peserta didik baik pada level nasional maupun lokal. Melalui pembelajaran yang mengaitkan dengan isu-isu terkini yang terjadi yang berkaitan dengan isu penegakan hukum maupun isu yang lainnya diharapkan peserta didik dapat secara *hands on* (aktivitas melakukan) dan *minds on* (aktivitas berpikir) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan karakter sehingga ketika peserta didik lulus dan berkecimpung dalam dunia kerja nilai-nilai tersebut masih melekat pada diri peserta didik.

Hasil wawancara dengan beberapa Dosen pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta disimpulkan bahwa PTKIN di Indonesia, selain pada proses belajar mengajar, pola penerapan nilai-nilai pendidikan karakter pada PTKIN Indonesia juga dilakukan pada setiap kegiatan kemahasiswaan baik pada organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Penumbuhkembangan nilai-nilai karakter berwawasan kebangsaan pada kehidupan non akademik kemahasiswaan sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pengaruh yang berasal dari luar yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai moral dan karakter dari kegiatan kemahasiswaan. Untuk itu pendampingan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan oleh tenaga pendidik menjadi salah satu alternatif solusi yang ditempuh.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan para dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta FGD yang dilakukan dengan para dosen dan mahasiswa serta beberapa pemangku kebijakan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 9-10 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Paradigma baru pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Era Pasar bebas, globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya PT melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Jaminan Mutu Pendidikan untuk menjamin agar mutu pendidikan di suatu PT dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang fleksibel dan dinamis agar memungkinkan setiap perguruan tinggi untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan tuntutan eksternal yang dihadapinya. Kelemahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu bidang manajemen yang mencakup dimensi proses dan substansi. Pada tataran proses, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum dilakukan dengan prosedur kerja yang ketat. Pada tataran substantif, seperti personalia, keuangan, sarana dan prasarana,

instrument pembelajaran, layanan bantu, layanan perpustakaan, dan sebagainya, tidak hanya substansinya belum komprehensif, melainkan kriteria keberhasilan untuk masing-masingnya belum ditetapkan secara taat asas.

2. Pendidikan karakter di Indonesia sudah di mulai sejak tokoh-tokoh yang dikenal di Indonesia. Pendidikan karakter semestinya mempunyai tujuan jangka panjang yang didasarkan pada tantangan aktif kontekstual individu atas *impuls natural social* yang diterimanya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan karakter berwawasan kebangsaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada empat, yaitu 1) berkelanjutan; 2) melalui semua mata kuliah, pengembangan diri, dan budaya kampus; 3) nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan; dan 4) proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Adapun strategi dalam pendidikan karakter pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada lima, yaitu 1) keteladanan, 2) penanaman kedisiplinan, 3) pembiasaan, 4) menciptakan suasana yang kondusif, dan 5) integrasi dan internalisasi. Pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan pada UIN Sunan Kalijaga memberikan tiga matra penting dalam setiap tindakan edukatif dan campur tangan intensional bagi sebuah kemajuan pendidikan. Ketiga matra pendidikan karakter itu adalah individu, sosial, dan moral.
3. Pengembangan Kurikulum KKNI berbasis Karakter dan berwawasan kebangsaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diupayakan dengan mengasah potensi mahasiswa untuk menjadi agen yang berwawasan luas dan memiliki skill yang memang

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masyarakat. Selain itu, itu juga dengan menentukan tujuan akhir sebagai hasil capaian pembelajaran yang selama ini diajarkan. Dengan demikian, adanya penerapan KKNi ini menjadikan mahasiswa lebih banyak berkontribusi dalam berbagai hal.

4. Pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai menjadi upaya eksplisit mengajarkan nilai-nilai untuk membantu peserta didik mengembangkan disposisi-disposisi guna bertindak dengan cara-cara yang pasti. Persoalan baik dan buruk, kebajikan-kebajikan dan keutamaan-keutamaan menjadi aspek penting dalam pendidikan karakter. Optimalisasi terhadap pembentukan karakter dan berwawasan kebangsaan pada UIN Sunan Kalijaga diselaraskan dengan kurikulum yang diterapkan pada perguruan tinggi yaitu kurikulum yang mengacu kepada KKNi.

B. Saran-Saran

1. Ikhtiar dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja harus terus diupayakan oleh PTKIN Indonesia.
2. Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri di berbagai tempat menyisakan tugas perguruan tinggi keagamaan Islam untuk menyelesaikan konsep dan penerapan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Integrasi tersebut merupakan distingsi utama antara perguruan tinggi agama dengan perguruan tinggi umum.
3. Implementasi KKNi dalam pengembangan kurikulum PTKI menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan

aspek kekhususan dari PTKI. Dengan begitu, lulusan PTKI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai professional muslim. Lulusan PTKI juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Handari. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Patimah, S., & Tabrani, Z. A. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7087-7089.
- Walidin, W., Idris, S & Tabrani. ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohindi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Koesoema, D.A. (2007). *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo
- Kemendiknas, (2010). *Kebijakan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas
- Fatchul Mu'in, (2011). *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Ar- Ruz Media: Yogyakarta
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pfeffer, Jeffrey. (1996), *Keunggulan Bersain Melalui Manusia: (Competitive Advantage Through People)*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Bartky, J.A. (1956). *Administration an Educational Leadership*. California: Stanford University Press
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. (2003). *Total Quality Management*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasution.M.N. (2001). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sallis, E. (1993). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page.

- Crosby, P. (1979). *Quality is free*. New York: Mc Graw Hill Book Inc.
- Danim, S. (2003). *Menjadi Komunitas Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Kurniawan, Fajar. (2009). *Pendidikan Dasar Kewarganegaraan*, Jakarta: Sri Gunung
- Abdullah, A., & Tabrani ZA. (2018). Orientation of Education in Shaping the Intellectual Intelligence of Children. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8200–8204. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12523>
- Ahmad, dkk. (1998). *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Pustaka Setia.
- AR, M., Usman, N., Tabrani ZA, & Syahril. (2018). Inclusive Education Management in State Primary Schools in Banda Aceh. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8313–8317. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12549>
- BAN-PT. (2011). *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT
- Bondi, J., dan Wiles, J. (1989). *Curriculum Development: A Guide to Practice*. Columbus: Merrill Publishing Company, A Bell & Howel Information Company.
- Brodjonegoro, S. S. (2008). “Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Daya Saing Perguruan Tinggi”, *Makalah*. Malang: Universitas Brawidjadja.
- BSNP. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan
- Busro, Muhammad dan Siskandar. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Cangara, Hafied. (2017). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi Cetakan 3*. Jakarta: Rajawalli Pers.
- Dakir. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2014). *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2014). *Kurikulum Perguruan Tinggi Sesuai KKNI*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementritekdikti .
- Dirjendikti. (2010). *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. (2012). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Hadis, Abdul dan Nurhayati. (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hamalik, Oemar. (2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hamalik, Oemar. (2007). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Idi, Abdullah. (2007). *Pengembangan kurikulum: teori & praktik / Abdullah Idi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96–113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Idris, S., Tabrani ZA, & Sulaiman, F. (2018). Critical Education Paradigm in the Perspective of Islamic Education. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8226–8230. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12529>
- Khaerudin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Lokal Berwawasan Global*, (<http://www.ilmupendidikan.net>)
- Manab, Abdul. (2004). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Manab, Abdul. (2015). *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah: Pemetaan Pengajaran*. Yogyakarta: Kalimedia.

- Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kencana.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musradinur, & Tabrani ZA. (2015). Paradigma Pendidikan Islam Pluralis Sebagai Solusi Integrasi Bangsa (Suatu Analisis Wacana Pendidikan Pluralisme Indonesia). *1st Annual International Seminar on Education 2015*, 77–86. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Nasution. (1989). *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution. (2005). *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Olivia, Peter F. (1980). *Developing and Development Curriculum*, New York: Harcourt Brace Javanovich Publishers.
- Patimah, S., & Tabrani ZA. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. *Advanced Science Letters*, 24(10), 7087–7089. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12414>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Peperintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Ramayulis. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosyadi, Khoiron. (2004). *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusman. (2011). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sagala, Syaiful. (2013). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Public dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo.

- Sanjaya, Wina. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.
- Sastrawijaya, A. Tresna. (1991). *Pengembangan Program Pengajaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soetopo, Hendyat dan Soemanto, Wasty. (1987), *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Subdit KPS. (2008). *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Sukamadinata, Nana Syaodih. (2004). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomot 232/U/2000 Tahun 2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomot 045/U/2002 Tahun 2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
- Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomot 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Suryosubroto. (2005). *Tatalaksana Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tabrani ZA. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam (antara Tradisional dan Modern)*. Kuala Lumpur: Al-Jenderami Press.
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2012). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2013a). Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi*, 1(1), 65-84.
- Tabrani ZA. (2013b). *Pengantar Metodologi Studi Islam*. Banda Aceh: SCAD Independent.

- Tabrani ZA. (2014a). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
- Tabrani ZA. (2014b). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211–234.
- Tabrani ZA. (2014c). Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam Perspektif Pedagogik Kritis. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2), 250–270. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.75>
- Tabrani ZA. (2015a). *Arah Baru Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tabrani ZA. (2015b). *Persuit Epistemology of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kaleidoskop Nasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Triwiyanto, Teguh. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Universitas Pendidikan Ganesha (2016). *Panduan Pengembangan Kurikulum Undksha 2016 untuk Program Sarjana dan Diploma 3*. Bali: Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
- Usman, N., AR, M., Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2018). The Principal's Managerial Competence in Improving School Performance in Pidie Jaya Regency. *Advanced Science Letters*, 24(11), 8297–8300. <https://doi.org/10.1166/asl.2018.12545>
- Usman, N., AR, M., Syahril, Irani, U., & Tabrani ZA. (2019). The implementation of learning management at the institution of modern dayah in aceh besar district. *Journal of Physics:*

Conference Series, 1175(1), 012157.
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012157>

Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.